MODUL

PELATIHAN KADER DASAR 2021
PMII KOMISARIAT SULTAN HADLIRIN
CABANG JEPARA

Mewujudkan Kader Mujahid yang Berinteletual
Berlandaskan Aswaja

PMIIKOMSUHA_ PMII UNISNU JEPARA

Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Komisariat Sultan Hadlirin

Unisnu Jepara

Periode 2020- 2021

SEMANGAT TANPA BATAS

Perubahan memerlukan sebuah perjuangan,

bukan hanya sekedar duduk dan diam sahabat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Pergerakan!!!

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat ridho dan hidayah-Nya kita masih bisa menjalin kembali silaturrahim. Sholawat serta salam kami panjatkan kepada sang revolusioner sejati kita yakni Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, berkat limpahan Perjuangan beliau pula kita mampu membedakan perkara yang tercela dan Terpuji dalam ruang lingkup kehidupan.

Sedikit atau banyak, sekecil apapun pengalaman baik ilmu, pengetahuan dan apalagi sejarah organisasi itu merupakan arsip karya selama tidak melanggar aturan baik Agama, berbangsa dan bernegara. Bahwa hal terbesar yang dilakukan PMII selama ini adalah belajar mempertahankan keidealisan secara realistis terus menerus berakan dengan berbagai dinamikanya sekaligus merajut berbagai komponen sosial dan lingkungan sekitar untuk memperkuat rasa kepedulian kita sebagai Kader PMII khususnya.

Maka dari itu dalam Pelatihan Kader Dasar (PKD) yang diselenggarakan oleh PMII Komisariat Sultan Hadlirin Unisnu Jepara ini bukanlah hanya sekedar kegiatan formalitas semata akan tetapi bagaimana seluruh peserta yang nantinya menjadi kader *mujahid* bisa mempertahankan tradisi-tradisi ruang gerak PMII itu sendiri dan membuat perubahan khusus nya setiap pribadi kader PMII menjadi lebih baik serta peduli kepada Bangsa, Negara dan Agama.

Maka dengan awal terbukanya ruang gerak baru ini, Penulis mewakili Seluruh Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Sultan Hadlirin Cabang Jepara, mengharapkan seluruh kader menumbuhkan jiwa-jiwa ke-PMII-an yang sudah tertanam sejak lama dan segera diaplikasikan dan diimplementasikan lebih khususnya ruang lingkup lingkungan sekitar lebih khususnya pada pribadi sendiri.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jepara, 01 Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i
Kata Pengantar iv
Daftar Isi v

MATERI I : ASWAJA MANHAJ AL-FIKR WAL HAROKAH

A. Pengertian Aswaja dan Aswaja dalam Lingkup PMII 7
B. Aswaja Sebagai Manhaj al-Fikr Wal Harokah 9
C. Implementasi Aswajadalam Nilai-Nilai Gerakan PMII 13

MATERI II : PETA GERAKAN ISLAM

A. Sejarah Gerakan Islam 15
B. Perkembangan Gerakan Islam 17
C. Segmentasi Antar Ormas Islam 19

MATERI III : PARADIGMA PMII

A. Filosofi Paradigma PMII 22
B. Rumusan Paradigma Sebagai Gerakan 23
C. Penerapan Paradigma Gerakan dalam Kehidupan Pribadi dan Berorganisasi .. 26

MATERI IV : ANALISIS WACANA DAN MEDIA

A. Pengertian Analisis Wacana 28
B. Tindakan 30
C. Analisis Media 30

MATERI V : ANALISIS SOSIAL

A. Konsep Analisis Sosial 34
B. Ruang Lingkup Analisis Sosial 34
C. Pentingnya Teori Sosial 34
D. Langkah-Langkah Analisis Sosial 35
E. Peranan Analisis Sosial dalam Strategi Gerakan PMII 36

MATERI VI : TEKNIK LOBBY DAN MEMBANGUN JARINGAN

A. Pengertian Lobby 37
B. Pihak-pihak yang terlibat dalam Lobby 38
C. Tujuab dan Manfaat Lobby 39
D. Norma dan Etika dalam melakukan Lobby 39

E. Strategi melakukan Lobnby dan Tekniknya 40
F. Membangun Jaringan 43

MATERI VII : MANAJEMEN AKSI

A. Pengertian Manajemen Aksi 45
B. Aturan Hukum 45
C. Mekanisme Lahirnya Keputusan Aksi 46
D. Bentuk dan Susunan Massa Aksi 46
E. Tahapan Aksi 46

MATERI VIII :NAHDLATUN NISA'

Gerakan dari Massa ke Massa 50

MATERI IX : STRATEGI PENGEMBANGAN PMII

A. Filosofi Strategi dan Pengembangan PMII 56
B. Pemahaman Citra Diri Organisasi 57
C. Pengembangan Kapasitas Kader 59

Daftar Pustaka 61
Catatan Penting 62

MATERI I
ASWAJA MANHAJ AL-FIKR WAL HAROKAH

A. PENGERTIAN ASWAJA DAN ASWAJA DALAM LINGKUP PMII

Secara harfiah arti Ahlussunnah wal Jama'ah adalah sebagai berikut:

Ahl berarti keluarga Nabi SAW, sahabat Nabi dan tabi'in (pengikut nabi), jika dikaitkan dengan aliran atau madzhab maka artinya adalah pengikut aliran atau pengikut madzhab.

Al-Sunnah mempunyai arti jalan, di samping memiliki arti al-Hadist. Disambungkan dengan ahl keduanya bermakna pengikut jalan Nabi, para Shahabat dan tabi'in.

Al-Jamaah berarti sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Bila dimaknai secara kebahasaan,

Ahlussunnah wal Jama'ah berarti segolongan orang yang mengikuti jalan Nabi, ParaShahabat dan tabi'in.

Dalam tradisi yang dikembangkan NU, penganut aswaja didefiniisikan sebagai orang yang mengikuti salah satu madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dalam bidang fiqih, mengikuti imam al-asy'ari dan maturidi dalam bidang aqidah, mengikuti al-junaidi dan al-ghazali dalam bidang tasawuf. Dalam sejarahnya definisi semacam ini dirumuskan oleh Hadratus Syaikh Kiai Hasyim Asy'ari sebagaimana tertuang dalam *Qonun* Asasi Nahdhatul Ulama. Dalam perspektif pendekatan Aswaja dalam setting sosialpolitik dan kultural saat doktrin tersebut lahir atau dikumandangkan. Dengan demikian dalam konteks Fikih misalnya, yang harus dijadikan bahan penimbangan bukanlah produknya melainkan bagaimana kondisi social politik dan budaya ketika Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali melahirkan pemikiran Fiqih-nya.

Kita tahu selama ini Masyarakat Nahdliyin memahami Aswaja sebagai doktrin ajaran agama semata, dimana hanya digunakan sebagai tolak ukur berislam dengan faham aswaja (madzhab). Tidak sedikit dari mereka yang belum memahami bahwa sesungguhnya aswaja bukan hanya sekedar madzhab sebagaimana dirumuskan oleh Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari, akan tetapi telah memuat serangkaian metodologi berfikir (*manhaj al-fikr)*.

Aswaja sebagai *manhaj al-fikr* merupakan konsep dasar yang tidak dapat lepas dari gagasan KH. Said Aqil Siradj yang mengundang kontroversi pada tahun 1991 dalam forum di Jakarta mengenai perlunya Aswaja ditafsir ulang dengan memberikan kebebasan lebih bagi para intelektual dan ulama' modern untuk merujuk langsung kepada ulama' dan kepada pemikir utama yang terdapat dalam pengertian Aswaja. Dengan demikian Aswaja senantiasa fleksible dan terbuka untuk ditafsir ulang dan disesuaikan dengan konteks masa kini dan yang akan datang. Inilah yang dinamakan sebagai ideologi terbuka.

PMII melihat bahwa gagasan tersebut sangat relevan dengan perkembangan zaman, selain karena alasan muatan doktrinal Aswaja selama ini yang terkesan terlalu kaku. Sebagai manhaj, Aswaja menjadi lebih fleksibel dan memungkinkan bagi pengamalnya untuk menciptakan ruang kreatifitas dan melahirkan ikhtiar-ikhtiar baru untuk menjawab perkembangan zaman.

PMII menjadikan Aswaja sebagai *manhajul fikr* yaitu metode berpikir tertentu yang digariskan oleh para sahabat Nabi dan tabi'in yang memiliki Intelektualitas tinggi dalam menyingkapi situasi politik dan sosial ketika itu. Dari *manhajul fikr* inilah lahir pemikiran-pemikiran keislaman baik di bidang aqidah, syari'ah, maupun akhlaq/tasawuf, yang walaupun beraneka ragam tetap berada dalam satu ruh.

Oleh karena itu PMII bukan hanya menjadikan Aswaja sebagai paham yang terbingkai dalam platform ideologi (*manhajul fikr*) akan tetapi juga dijadikan sebagai kerangka refleksi gerakan (*al-harakah*), artinya Aswaja dalam PMII bukan dijadikan alat pengklaiman akan tetapi juga di implementasikan dalam bentuk sebuah tindakan hal ini senada dengan Tri Khidmat PMII, Bertaqwa, Berilmu, dan Profesional.

PMII juga menjadikan Aswaja sebagai kerangka refleksi gerakan *(al-harakah)* karena Aswaja sebagai manhajul fikr bukan sekedar berpikir dinamis-proggessive akan tetapi juga harus di implementasikan dalam sebuah gerakan yang aplikatif, artinya Aswaja tidak hanya dijadikan sebagai kerangka ideologi dan mengkristal menjadi simbol formalitas gerakan organisasi, akan tetapi juga harus tertuang dalam kerangka aksi aktivitas keseharian, sangat bohong bahkan munafik jika seseorang mengaku berideologi Aswaja akan tetapi perbuatannya

jauh dari nilai-nilai Aswaja, sebab dengan seperti itu dia sudah menjadikan aswaja sebagai kemasan pribadinya (formalisasi), tetapi jauh dari nilai aswaja yang sesungguhnya.

B. ASWAJA SEBAGAI MANHAJ AL-FIKR WAL HAROKAH

Didalam PMII Aswaja dijadikan sebagai Manhajul fikr artinya Aswaja bukan dijadikan tujuan dalam beragama melainkan dijadikan metode dalam berfikir untuk menyelesaikan masalah agama. Walaupun banyak tokoh yang telah mencoba mendekontruksi isi atau konsep yang ada dalam aswaja tapi sampai sekarang aswaja dalam sebuah metode berfikir ada banyak relevansinya dalam kehidupan beragama, sehingga PMII lebih leluasa dalam membuka ruang dialektika dengan siapapun dan kelompok apapun.

Aswaja sebagai *manhaj al-fikr wal harakah* atau *manhaj taghayyur ijtima'* yakni sebuah metodologi berpikir dan gerakan atau metodologi gerakan sosial, hal ini diasumsikan agar aswaja menjadi produk ilmiah yang amaliyah dan amaliyah yang ilmiyah. yakni mengasumsikan aswaja sebagai visualisasi sebuah konsep yangmengharapkan adanya sebuah tindakan, dan legitimasi atau justifikasi terhadap sebab- sebab sebuah tindakan. simpelnya, aswaja harus diaktualisasikan dalam sebuah bentuk tindakan bukan hanya selesai dalam bingkai tulisan maupun retorika lisan.

Sebagai *manhaj al-fikr wal harakah*, PMII berpegang pada prinsip-prinsip tawasuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (netral), dan ta'adul (keadilan).

1) Tawasuth (Moderat)

Tawassuth bisa dimaknai sebagai berdiri di tengah, moderat, tidak ekstrim (baik ke kanan maupun ke kiri), tetapi memiliki sikap dan pendirian. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi muhammad SAW bahwa Khairul umur awsathuha (Paling baiknya sesuatu adalah pertengahannya). Tawasuth merupakan nilai yang mengatur pola pikir, yaitu bagaimana seharusnya kita mengarahkan pemikiran kita. Dalam rentang sejarah, kita menemukan bahwa nilai ini mewujud dalam pemikiran para imam yang telah disebut di atas.

Di bidang aqidah atau teologi, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al- Maturidi, hadir sebagai dua pemikir yang tawassuth. Di satu sisi mereka berusaha untuk menghindari pemikiran Mu'tazilah yang terlalu rasional dan memuja-muja kebebasan berpikir sehingga menomorduakan al-quran dan sunnah rasul. Tetapi di sisi lain beliau tidak sepakat dengan golongan Salafi yang sama sekali tidak memberi tempat bagi akal dan memaknai al-quran dan hadits secara tekstual. Mereka berusaha menggabungkan dua pendekatan itu dan kemudian melahirkan dua konsep teologi yang saling melengkapi.

Di bidang fiqih atau hukum Islam kita juga mendapatkan Abu Hanifah, Malik bin Anas, Al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal sebagai para pemikir yang moderat. Mereka berempat dengan ciri khasnya masing-masing membangun konsep fiqih Islam yang di dasarkan kepada Al-quran dan hadits, namun pemahamannya tidak terjebak kepada fiqh yang terlalu bersandar kepada tradisi ataupun kepada rasionalitas akal belaka.

Di bidang tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali tampil dengan pemikiran tasawuf yang berusaha mencari sinergitas antara kelompok falsafi dengan konservatif. beliau berhasil melahirkan konsep tasawuf sunni yang menjadikan taqwa (syari'ah) sebagai jalan utama menuju haqiqah. Dengan demikian, beliau berhasil mengangkat citra tasawuf yang waktu itu dianggap sebagai ajaran sesat sebab terlalu menyandarkan diri kepada filsafat Yunani dan tidak lagi mematuhi rambu-rambu syari'ah, seperti ajaran sufi Al-Hallaj. Apa yang dilakukan oleh Imam Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali sama dengan Wali Sanga pada masa awal Islam di Jawa ketika menolak ajaran tasawuf Syekh Siti Jenar.

2) Tasammuh (Toleran)

Tasamuh adalah toleran. Sebuah landasan dan bingkai yang menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak dan merasa benar sendiri. Nilai yang mengatur bagaimana kita harus bersikap dalam hidup sehari-hari, khususnya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Tujuan akhirnya

adalah kesadaran akan pluralisme atau keragaman, yang saling melengkapi bukan membawa kepada perpecahan.

Dalam kehidupan beragama, tasamuh direalisasikan dalam bentuk menghormati keyakinan dan kepercayaan umat beragama lain dan tidak memaksa mereka untuk mengikuti keyakinan dan kepercayaan kita. Kita bisa menengok sejarah, bagaimana sikap para imam yang telah disebutkan di atas terhadap para penentang dan ulama-ulama lain yang berbeda pendapat dengan mereka. Para Imam tidak pernah menyerukan pelaknatan dan pengadilan kepada mereka, selama ajaran mereka tidak mengancam eksistensi agama Islam.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tasamuh mewujud dalam perbuatan-perbuatan demokratis yang tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Dan setiap usaha bersama itu ditujukan untuk menciptakan stabilitas masyarakat yang dipenuhi oleh kerukunan, sikap saling menghargai, dan hormat-menghormati. Sebagai contoh lihat bagaimana sikap Wali Sanga dalam menyebarkan Islam, terhadap umat beragama lain (Hindu-Budha) yang sudah lebih dulu ada di Jawa. Mereka lebih mengutamakan stabilitas masyarakat pada saat itu.

Di berbagai wilayah, tasamuh juga hadir sebagai usaha menjadikan perbedaan Agama, Negara, ras, suku, adat isdadat, dan bahasa sebagai hal dinamis bagi perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. perbedaan itu berhasil direkatkan oleh sebuah cita-cita bersama untuk membentuk masyarakat yang berkeadilan, keanekaragaman saling melengkapi. *Unity in diversity*.

PKD KOMSUHA 2021

3) Tawazun (Seimbang)

Tawazun berarti keseimbangan dalam bergaul dan berhubungan, baik yang bersifat antar individu, antar struktur sosial, antara Negara dan rakyatnya, maupun antara manusia dan alam. Keseimbangan di sini adalah bentuk hubungan yang tidak berat sebelah (menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain). Tetapi, masing-masing pihak mampu menempatkan dirinya sesuai dengan fungsinya tanpa mengganggu fungsi

dari pihak yang lain. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya kedinamisan hidup.

Dalam ranah sosial yang ditekankan adalah egalitarianisme (persamaan derajat) seluruh umat manusia. Tidak ada yang merasa lebih dari yang lain, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Tidak ada dominasi dan eksploitasi seseorang kepada orang lain, termasuk laki-laki terhadap perempuan.

Dalam wilayah politik, tawazun meniscayakan keseimbangan antara posisi Negara (penguasa) dan rakyat. Penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang, menutup kran demokrasi, dan menindas rakyatnya. Sedangkan rakyat harus selalu mematuhi segala peraturan yang ditujukan untuk kepentingan bersama, tetapi juga senantiasa mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Dalam wilayah ekonomi, tawazun meniscayakan pembangunan sistem ekonomi yang seimbang antara posisi Negara, pasar dan masyarakat. Sehingga terbangun struktur ekonomi yang stabil dan kesejahteraan hidup terjamin.

Dalam wilayah ekologi, tawazun meniscayakan pemanfaatan alam yang tidak eksploitatif (israf) dan merusak lingkungan. Banyak contoh dalam sejarah yang menunjukkan sikap ramah terrhadap lingkungan. Larangan menebang pohon waktu berperang misalkan, atau anjuran untuk reboisasi (penghijauan) hutan. Begitu juga ketika para intelektual muslim semacam al-Khawarizmi, al-Biruni, dan yang lain menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dan lahan penelitian ilmu pengetahuan.

4) Ta'addul (Adil)

Yang dimaksud dengan ta'adul adalah keadilan, yang merupakan pola integral dari tawassuth, tasamuh, dan tawazun. Keadilan inilah yang merupakan ajaran universal Aswaja. Setiap pemikiran, sikap dan relasi, harus selalu diselaraskan dengan nilai ini. Pemaknaan keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan sosial. Yaitu nilai kebenaran yang mengatur totalitas kehidupan politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Sejarah membuktikan bagaimana Nabi Muhammad mampu

mewujudkannya dalam masyarakat Madinah. Bagitu juga Umar bin Khattab yang telah meletakkan fundamen bagi peradaban Islam yang agung.

C. IMPLEMENTASI ASWAJA DALAM NILAI-NILAI GERAKAN PMII

Aswaja sebagai *manhaj al-fikr wal harakah* atau *manhaj taghayyur ijtima'* bisa kita tarik dari nilai-nilai perubahan yang diusung oleh Nabi Muhammad dan para sahabat ketika merevolusi masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yangtercerahkan oleh nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan universal. Ada dua hal pokok yangmenjadi landasan perubahan itu:

1) **Basis Nilai**, yaitu nilai kebenaran qurani dan sunnah nabi yang diimplementasikan secara konsekwen dan penuh komitmen.
2) **Basis Realitas**, yaitu keberpihakan kepada kaum tertindas dan masyarakat lapisan bawah.

Dua basis ini terus menjadi nafas perubahan yang diusung oleh umat Islam yang konsisten dengan aswaja, termasuk di dalamnya NU dan PMII. Konsistensi di sini hadir dalam bentuk semangat perjuangan yang dinamis, gerakan yang selalu terbuka untuk dikritik dan dikonstruk ulang, sesuai dengan dinamika zaman dan lokalitas. Dia hadir tidak dengan klaim kebenaran tunggal, tetapi selalu berdialektika dengan realitas, jauh dari sikap eksklusif dan fanatik.

Maka empat nilai yang dikandung oleh aswaja, untuk konteks sekarang harus kita tafsirkan ulang sesuai dengan perkembangan teori-teori sosial dan ideologi-ideologi dunia.

1. Tawassuth sebagai pola pikIr

Harus kita maknai sebagai tidak mengikuti nalar kapitalisme-liberal di satu sisidan nalar sosialisme di sisi lain. Kita harus memiliki cara pandang yang otentik tentang realitas yang selalu berinteraksi dalam tradisi. Pemaknaannya ada dalam paradigma yang dipakai oleh PMII yaitu paradigma kritis.

2. Tasamuh sebagai pola sikap

Harus kita maknai sebagai bersikap toleran dan terbuka terhadap semua golongan selama mereka bisa menjadi saudara bagi sesama. Sudah bukan waktunya lagi untuk terkotak-kotak dalam kebekuan golongan, apalagi agama. Seluruh gerakan dalam satu nafas pro-demokrasi harus bahu

membahu membentuk aliansi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik, bebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. PMII harus dapat bersikap terbuka terhadap pencari kebenaran dan membuang semua bentuk primordialisme (paham sosial kemasyarakatan) danfanatisme keagamaan.

3. **Tawazun sebagai pola relasi**

Dimaknai sebagai usaha mewujudkan egalitarianisme (persamaan derajat) dalam ranah sosial, tidak ada lagi kesenjangan berlebihan antar sesama manusia, antara laki-laki dan perempuan, antara kelas atas dan bawah.

Di wilayah ekonomi, PMII harus melahirkan model gerakan yang mampu menyeimbangkan posisi Negara, pasar dan masyarakat. Berbeda dengan kapitalisme yang memusatkan orientasi ekonomi di tangan pasar sehingga fungsi negara hanya sebagai obligator belaka dan masyarakat ibarat robot yang harus selalu menuruti kehendak pasar; atau sosialisme yang menjadikan Negara sebagai kekuatan tertinggi yang mengontrol semua kegiatan ekonomi, sehingga tidak ada kebebasan bagi pasar dan masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonominya.

Di wilayah politik, isu yang diusung adalah mengembalikan posisi seimbang antara rakyat dan negara. PMII tidak menolak kehadiraan negara, karena Negara melalui pemerintahannya merupakan implementasi dari kehendak rakyat. Maka yang perlu dikembalikan adalah fungsi negara sebagai pelayan dan pelaksana setiap kehendak dan kepentingan rakyat.

Di bidang ekologi, PMII harus menolak setiap bentuk eksploitasi alam hanya semata-mata demi memenuhi kebutuhan manusia yang berlebihan. Maka, kita harus menolak nalar positivistik yang diusung oleh neo-liberalisme yang menghalalkan eksploitasi berlebihan terhadap alam demi memenuhi kebutuhan bahan mentah, juga setiap bentuk pencemaran lingkungan yang justru dianggap sebagai indikasi kemajuan teknologi dan percepatan produksi.

MATERI II
PETA GERAKAN ISLAM

A. SEJARAH GERAKAN ISLAM

Di awal abad ke-20 menurut M. Atho Mudzhar (Karim, 7999: 41), kita menyaksikan Islam menjadi sebab bangkitnya solidaritas nasionalisme Indonesia ditandai dengan berdirinya Sarekat Islam(SI) pada tahun 1911, sebagai suatu unsur yang mempersatukan kebangkitan nasional. Namun pada era demokrasi terpimpin di bawah kepimimpinan rezim Orde Lama, presiden Soekarno, kedudukan kelompok Islam nasionalis beranjak melemah seiring dengan semakin dominannya pengaruh PKI dan meluasnya proyek sekularisasi pendidikan di Indonesia. Ketika Orde Lama ini tumbang dan berganti dengan kekuasaan rezim Orde Baru, di bawah pimpinan presiden Soeharto, Islam mengalami perkembangan yang dinamis dan transformatif.

Islam bukanlah kekuatan yang bersifat monolitik. Keragaman dan pluralitas dalam umat justru menjadi karakteristik utama dari Islam di Indonesia. Kendati ada keragaman, deskripsi umum terhadap Islam di Indonesia bisa disederhanakan kepada karakteristik adanyadua aliran besar (school of thought), yakni Islam modernis, dengaan representasi utama pada Muhammadiyah (berdiri pada 1912) dan Islam tradisionalis, dengan representasi utama adalah NU, yang berdiri pada 1926.

Penggambaran Islam di Indonesia ke dalam kategori modernis dan tradisionalis ini telah menjadi kebiasaan baik di kalangan pengamat maupun umat Islam itu serrdiri. Namun, sejak berakhirnya era Orde Baru dengan memasuki era Reformasi pada 1998 maka penggambaran ke dalam dua kategori semacam ini tidak lagi mencerminkan realitas sebenarnya yang semakin kompleks. Dicabutnya tekanan dan pembatasanpolitik oleh negara telah membuka ruang bagi proses manifestasi berbagai ragam gerakan dan pemikiran dalam komunitas Islam di Indonesia.

Pasca rezim Orba tumbang terjadi perkembangan dan perubahan secara dinamis dan ekspresif di tengah umat Islam, ditandai dengan beberapa hal, seperti: **Pertama,** lahirnya sejumlah partai politik yang secara formal mengusung ideologi dan cita-cita Islam, yang sebelumnya dilarang secara tegas

oleh rezim Orba. Fenomena ini mengindikasikanbangkitnya kernbali kekuatan-kekuatan Islam politik di Indonesia. **Kedua,** tampilnya berbagai gerakan-gerakan yang selama masa Orba kurang dikenal oleh masyarakat, dan **ketiga,** kelahiran organisasi-organisasi Islam baru. Ciri dan lingkup kegiatan organisasi-organisasi Islam yang baru ini sangat beragam dan luas. Akibatnya, wajah Islam di Indonesia menjadi semakin beragam dan kompleks, sehingga penggambaran yang hanya menekankan pada eksistensi, aktivitas, dan pemikiran Islam mainstream, modernis dan tradisionalis, tidak lagi memberikan pemahaman yang menyeluruh dan utuh terhadap kehidupan Islam di Indonesia.

Sering dengan pergerakan manusia, baik karena factor militer, politik, maupun ekonomi, menyebarlah Islam ke Eropa, Afrika, juga Asia. Sampailah juga ke Indonesia, melalui Aceh, kemudian masuk ke Jawa. Sebagaimana di dunia Arab, Islam di Indonesia pun memiliki wajah yang beragam. Hanya saja keberagaman ini memiliki corak berbeda dengan dunia Arab. Islam Indonesia memang mengenal narasi-narasi besar di atas. Namun sebatas wacana. Dalam pengertian, diperoleh melalui kitab-kitab yang dibawa atau dipelajari di Arab. Bukan merupakan hasil teorisasi kenyataan social. Narasi-narasi tersebut tidak memiliki basissocial signifikan di bumi Indonesia, sebagaimana di Arab.

Sedangkan arus utama keislaman yang berkembang dapat dikatakan dalam garis besar ahlus-sunnah. Dalam garis ini kemudian muncul apa yang dalam ilmu social dikategorikan sebagai Islam modernis dan Islam tradisionalis. Akar intelektual keduanya sama-sama dari dunia Arab. Aliran kecil lainnya juga berkembang, seperti syiah, ahmadiyyah, islam kejawen, dan lainnya, hingga sekarang. Masing-masing varian diusung bukan hanya oleh satu organisasi social keagamaan.

Dalam waktu yang cukup lama, diskursus Islam di Indonesia diwarnai oleh dikotomi tersebut. Sejak decade 90-an muncul warna baru dalam diskursus keislaman. Muncullah apa yang disebut dengan Islam pembebasan, Islam kiri, Islam progresif, Islam Liberal, Islam transformatif, Islam pluralis, islam postdogmatik, Islam emansipatoris, dan lainnya. Islam tradisionalisme, atau modernisme, sayup-sayup masih menunjukkan kekukuhannya di lapisan

masyarakatnya masing-masing. Menjadi pijakan nilai, panduan keseharian, dan pusat orientasi hidup.

Islam sebagai suatu agama tentunya memiliki batasan dalam menyentuh aspek parksis kehidupan manusia. Karena, walaupun sumber-sumber utama ajaran Islam (Al-Qur‟an dan Sunnah) sering diklaim sebagai ajaran yang lengkap dan komprehensif, namun tentu tidak memberikan petunjuk-petunjuk praktis bagi umatnya dalam mengarungi kehidupan. SehinggaIslam memberikan ruang tafsir yang begitu luas bagi umatnya dalam rangka mengejawantahkan ajaran Islam ke dalam dunia keseharian. Hal ini didukung oleh pernyataan M. Imam Aziz dan juga Farid Wajidi berikut ini: bahwa pembahasan teologis tidak dapat berdiri sendiri tanpa penuntasanya melalui shari-ah. Islam adalah relegion of action yang lebih menekankan arti penting perbuatan dari pada niat, Islam terdiri dari Aqidah dan Syariah. Pemikiran teologis harus dibarengi dengan dengan perumusan hukum. Begitu juga hukum-hukum syari-ah mau tidak mau harus menyentuh dan berangkat dari doktrin teologis. Dengan demikian pembaruan teologis tanpa pembaruan syariah akanmengalami kegagalan.

B. PERKEMBANGAN GERAKAN ISLAM

Dalam upaya menjelaskan gradasi pemikiran Islam di setiap zaman, Fazlur Rahman misalnya dengan metode historisnya, membagi perkembangan pemikiran Islam menjadi lima yaitu; tradisionalis, revivalis, modernisme klasik, neo revivalis, dan neo modernis.

1. **Kelompok Tradisionalis,** mereka adalah kelompok yang memiliki keterikatan kuat dengan ulama abad pertengahan. Kelompok tradisionalis menganggap pintu idjtihad sudah tertutup, hal ini berkaitan dengan pandangan bahwa ulama-ulama mahzab terdahulu telah merumuskan permasalahan kehidupan secara lengkap. Jadi, kalaupun ada masalah-masalah baru yang belum diputuskan oleh ulama-ulama terdahulu, tinggal dikiaskan saja dengan fatwa-fatwa mereka. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan mereka yang menganggap bahwa ulama sekarang tidak mampu melakukan ijtihad karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Jadi, secara singkat mereka begitu mengkultuskan ulama-

ulama mahzab dan selalu merujuk kepada keputusan-keputusan mereka dalam mengatasi permasalahan yang berkembang dalam konteks kekinian.

2. **Kelompok Revivalis,** pemikiran ini muncul diakibatkan adanya rasa keprihatinan yang dalam mengenai keterpurukan kaum muslimin. Sehingga hadirlah suatu gerakan pembaharuan yang mencoba mengangkat kembali derajat kaum muslimin. Gerakan mereka terutama berusaha menghindarkan umat Islam dari praktek tahayul dan khurofat dengan cara kembali kepada ajaran sumber utama Islam; Al-Qur‟an dan Sunnah. Sebagai pembeda pemikiran kaum revivalis dengan pemikiran selanjutnya (modernis), mereka tidak mendasarkan pembaharuannya kepada konsep-konsep Barat. Tokoh sentral gerakan ini menurut Rahman adalah Ibn Abdul Wahab yang pada tahap selanjutnya menjelma menjadi kekuatan pemikiran besar yang disebut Wahabi.
3. **Kelompok Modernisme Klasik,** kemunculannya adalah pada awal abad ke-19. Walaupun bertolak dari semangat yang dikobarkan kaum revivalis, namun kelompok pemikir ini sudah memiliki relasi dengan para pemikir Barat. Selain itu, kaum modernis juga memiliki perluasan isi ijtihad. Sehingga mereka mulai berani mengurai masalah-masalah sosial seperti mengenai demokrasi, kesetaraan pria-wanita, dan pembaharuan pendidikan yang diperoleh dari interaksi dengan dunia Barat. Walaupun begitu, mereka tetap menyandarkan pemikirannya dalam kerangka keIslaman. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam golongan ini diantaranya adalah Sayyid Jamaludin Al Afgani dan Muhammad Abduh.
4. **Kelompok Neo-Revivalis**, pemikiran ini muncul sebagai respon terhadap pemikiran modernisme klasik (demokrasi dan juga kemajuan pendidikan). Namun relasi antara kaum neo-revivalis dengan kaum modernisme klasik tidak selamanya antagonis. Ada tiga hal yang menjadi penolakan kaum neo revivalis terhadap pemikiran kaum modernis yaitu mengenai bunga bank, aurat wanita dan juga keluargaberencana. Pemikiran ini muncul pada awal abad ke 20 di daerah Arab Timur Tengah, India-Pakistan, dan juga Indonesia.

5. **Kelompok Neo-Modernis,** menurut Rahman, kehadiran kelompok ini adalah mencoba merespon pemikir-pemikir kelompok yang terlebih dahulu hadir. Keterkaitan mereka dengan pemikiran Barat begitu kuatnya bahkan mereka begitu tercelup dalam arus westrenisasi. Kelompok ini mencoba merekonstruksi pemikiran Islam secara radikal. Mereka mencoba menawarkan metode baru dalam memaknai Al-Qur‟an, yaitu melalui pendekatan- pendekatan filsafat hermenetika (tafsir). Hal ini tentunya memunculkan gelombang kontroversi yang begitu besar dikalangan muslim dari golongan tradisionalis dan revivalis yang masih memiliki kerigidan metode dalam menafsirkan Al-Qur‟an, terutama kaum tradisionalis yang masih sangat mengkultuskan ulama abad pertengahan.

C. SEGMENTASI ANTAR ORMAS ISLAM

Dari segi gerakan dan organisasi massa/parpol, kita mengenal beberapa segmen,antara lain:

a. Sarekat Dagang Islam-SDI (1905),
b. Jamiatul Khoiriyah (1905),
c. SDI berubah menjadi SI (1911),
d. Muhammadiyah (1912),
e. Al-Irsyad (tt)
f. Persis (1923),
g. Nahdlatul Ulama‟ (1926),
h. Perti (1928),
i. Al-Washliyah (1930), dll.

Adapun yang berbentuk partai politik, antara lain:a. PSI (1923),

a. Perti (tt),
b. Partai Arab (tt),
c. Masyumi (1943),
d. Nahdlatul Ulama (1953),
e. PSII (tt),
f. Parmusti (tt), dll.

Kini partai politik islam terfragmentasi pada berbagai partai, antara lain : PKB, PPP, PAN, PKS, dan PBB. Dikalangan pemuda dan mahasiswaan, antara

lain : PMII, HMI, IPNU/IPPNU, PEMUDA MUHAMMADIYAH, IMM, PII, dan lain-lain. Pada kelompok kepentingan *(interest group)* terdapat beberapa organisasi, antara lain: FPI, HTI, KISDI, Laskar Jihad, JAT, DDII, JIL, JIM, dan lain-lain.

Menurut catatan yang diambil dari Workshop Islam dan Pluralisme (2008) Semua varian yang disebutkan di atas dalam sejarah keindonesiaan tidak jarang satu sama lain mengalami benturan, ketegangan, pergesekan, dan persaingan yang sangat dinamis. Dinamika itu terjadi karena didorong oleh banyak faktor. Di antara faktor yang dominan adalah perebutan kekuasaan (akses) politik dan ekonomi. Relasi antar organisasi ini juga tidak simetris atau paralel, tetapi seperti sarang laba-laba yang satu titik dengan titik lain bisa saling berhubungan. Jaring laba-laba ini bukan untuk memperkuat atau melemahkan, melainkan semata-mata untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing.

Ragam gerakan dan pemikiran tersebut secara makro dan simplistis dapat dikategorikan menjadi dua saja, yakni, Pertama, Islam yang orientasi perjuangan dan cita-cita sosialnya menjunjung tinggi keluruhan Islam dan kaum muslimin (“izzul Islâm wal Muslimîn), yakni “Islam Eksklusif”. Yang masuk dalam kategori ini secara umum adalah organisasi DDII, LDII, FPI, MMI, HTI, Persis, dan sebagian orang Muhammadiyah. Kedua, Islam yang berorientasi pada kerahmatan semesta (rahmatan lil „âlamîn), yakni “Islam Inklusif”. Masuk dalam kategori inklusif secara umum adalah organisasi NU, orang-orang (bukan keorganisasiannya) Muhammadiyyah, al-Washliyyah, Perti, al-Khairat, dan NahdlatulWathan.

Pertanyaannya adalah, di mana posisi PMII di tengah pergumulan pemikiran dan gerakan Islam Indonesia? untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat ditelisik dari akarkesejarahannya, ideologi gerakannya, komunitasnya, dan segala performance yang melekat pada organisasi ini dan orang-orangnya. Di sini tidak ada yang akan memberikan stigma dan kategorisasi apapun kepada PMII. Karena hanya PMII-lah yang sejatinya tahu akan jati dirinya. Yang terpenting adalah bagaimana PMII tetap menjaga komitmennya sebagai

organisasi yang berbasis akademik, berbasis keislaman, dan keindonesiaan, yang secara dinamis terus dikontekstualisasikan dalam dimensi kekinian dan keakanan, untuk sebesar- besarnya kepentingan masyarakat, bangsa, agama dan kemanusiaan

PKD KOMSUHA 2021

MATERI III
PARADIGMA PMII

A. FILOSOFI PARADIGM PMII

Paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Khun, seorang ahli fisika teoritik, dalam bukunya "The Structure Of Scientific Revolution". Akan tetapi Khun sendiri, seperti ditulis Ritzer (1980) tidak mendefinisikan secara jelas pengertian paradigma, bahkan menggunakan kata paradigma dalam 21 konteks yang berbeda. Namun dari 21 pengertian tersebut oleh Masterman diklasifikasikan dalam tiga pengertian paradigma :

1. Paradigma metafisik yang mengacu pada sesuatu yang menjadi pusat kajianilmuwan.
2. Paradigma Sosiologi yang mengacu pada suatu kebiasaan sosial masyarakat ataupenemuan teori yang diterima secara umum.
3. Paradigma Konstrak sebagai sesuatu yang mendasari bangunan konsep dalamlingkup tertentu, misalnya paradigma pembangunan, paradigma pergerakan dll.

Masterman sendiri merumuskan paradigma sebagai "pandangan mendasar dari suatu ilmu yang menjadi pokok persoalan yang dipelajari (*a fundamental image a dicipline has of its subject matter*). Maka, jika dirumuskan secara sederhana sesungguhnya paradigma adalah "*How to see the World*" semacam kaca mata untuk melihat, memaknai, menafsirkan masyarakat atau realitas sosial. Tafsir sosial ini kemudian menurunkan respon sosial yang memandu arahan pergerakan.

Mengingat banyaknya definisi yang dibentuk oleh para sosiologi, maka perlu ada pemilihan atau perumusan yang tegas mengenai definisi paradigma yang hendak dimabil oleh PMII. Hal ini perlu dilakukan untuk memberi batasan yang jelas mengenai paradigma dalam pengertian komunitas PMII agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam memaknai paradigma. Berdasarkan pemikiran dan rumusan yang disusun oleh para ahli sosiologi, maka pengertian paradigma dalam masyarakat PMII dapat dirumuskan sebagai titik pijak untuk menentukan cara pandang, menyusun sebuah teori, menyusun pertanyaan dan membuat rumusan mengenai suatu masalah. Maka dari itu, Paradigma

menempati posisi yang vital bagi pergerakan organisasi, karenanya organisasi akan menetukan dan memilih nilai-nilai yang universal dan abstrak menjadi khusus dan praksis operasional yang akhirnya menjadi karakteristik sebuah organisasi dan gayaberpikir seseorang.

Melihat kepada sejarah PMII, bahwa pada masa periode kepengurusan sahabat Muhaimin Iskandar (1994-1997) dan sahabat Saiful Bachri Anshori (1997-2000), secara faktual dan operasional ada karakteristik tertentu yang berlaku dalam warga pergerakan ketika hendak melihat, menganalisis, dan menyikapi sebuah persoalan, yaitu sikap kritis dengan pendekatan teorti kritis. Dengan demikian secara umum telah berlaku paradigma kritis dalam tubuh warga pergerakan. Sikap seperti ini muncul ketika PMII mengusung sejumlah gagasan mengenai demokratisasi, *civil society*, penguatan masyarakat dihadapan negara yang otoriter, sebagai upaya aktualisasi dan implementasi atas nilai- nilai dan ajaran kegamaan yang diyakini.

B. RUMUSAN PARADIGM SEBAGAI GERAKAN

Melalui paradigma, pemikiran seseorang dapat dikenali dalam melihat dan melakukan analisis terhadap suatu masalah. Dengan kata lain, paradigma merupakan cara dalam "mendekati" obyek kajianya (*the subject matter of particular dicipline*) yang ada dalam ilmu pengetahuan. Orientasi atau pendekatan umum (*general orientations*) ini didasarkan pada asumsi-asumsi yang dibangun dalam kaitan dengan bagaimana "realitas" dilihat. Perbedaan paradigma yang digunakan oleh seseorang dalam memandang suatu masalah, akan berakibat pada timbulnya perbedaan dalam menyusun teori, membuat konstruk pemikiran, cara pandang, sampai pada aksi dan solusi yang diambil.

Melihat realitas yang ada di masyarakat dan sesuai dengan tuntutan keadaan masyarakat PMII baik secara sosiologis, politis dan antropologis maka PMII memilih paradigma kritis-transformatif sebagai pijakan/strategi gerakan organisasi. Makna dari "kritis" menurut kamus ilmiah populer berarti Tajam/ tegas dan teliti dalam menanggapi atau memberikan penilaian secara mendalam. Sehingga teori kritis adalah teori yang berusaha melakukan analisa secara tajam dan teliti terhadap realitas. Paradigma kritis berupaya menegakkan harkat dan martabat manusia dari berbagai belenggu yang diakibatkan proses sosial yang

bersifat profan. Kedua, paradigma kritis melawan segala bentuk dominasi dan perubahan. Ketiga, paradigma kritis membuka tabir dan selubung pengetahuan yang munafik dan hegemonik.

Paradigma kritis saja baru menjawab pertanyaan : struktur formasi sosial seperti apa yang sekarang sedang bekerja ? Ini baru sampai pada logika dan mekanisme *working-system* yang menciptakan relasi tidak adil, hegemonik, dominatif, dan eksploitatif. Namun, belum mampu memberikan prespektif tentang jawaban terhadap formasi sosial tersebut dan strategi mentransformasikannya. Disinilah "Term Transformatif" melengkapi teori kritis , karena dalam perspektif transformatif dianut epistimologi perubahan non-esensialis. Perubahan yang tidak hanya menumpukan pada revolusi politik atau perubahan yang bertumpu pada agen tunggal sejarah; entah kaum miskin kota (KMK), buruh atau petani, tapi perubahan yang serentak yang dilakukan secara bersama-sama. Disisi lain makna tranformatif harus mampu mentranformasikan gagasan dan gerakan sampai pada wilayah tindakan praksis ke masyarakat.

"Berpikir Kritis & Bertindak Tansformatif" itulah *Jargon* PMII dalam setiap membaca tafsir sosial yang sedang terjadi dalam konteks apapun. Dan ada beberapa alasan yang menyebabkan PMII harus memiliki Paradigma Kritis Transformatif sebagai dasar untuk bertindak dan mengaplikasikan pemikiran serta menyusun cara pandang dalam melakukan analisa terhadap realitas sosial. Alasan-alasan tersebut adalah :

Pertama, masyarakat Indonesia saat ini sedang terbelenggu oleh nilai-nilai kapitalisme modern. Kesadaran masyarakat dikekang dan diarahkan pada satu titik yaitu budaya massa kapitalisme dan pola pikir *positivistic modernisme*. Pemikiran-pemikiran seperti ini sekarang telah menjadi sebuah berhala yang mengharuskan semua orang untuk mengikatkan diri padanya. Siapa yang tidak melakukan, dia akan ditinggalkan dan dipinggirkan, eksistensinya-pun tidak diakui. Akibatnya jelas, kreatifitas dan pola pikir manusia menjadi tidak berkembang. Dalam kondisi seperti ini maka penerapan paradigma kritis transformatif menjadi suatu keniscayaan.

Kedua, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, baik etnik, tradisi, kultur maupun kepercayaan. Kondisi seperti ini sangat

memerlukan paradigma kritis transformatif, karena paradigma ini akan memberikan tempat yang sama bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dan kreatifitasnya secara maksimal melalui dialog yang terbuka dan jujur. Dengan demikian potensi tradisi akan bisa dikembangkan secara maksimal untuk kemanusiaan.

Ketiga, sebagaimana kita ketahui selama pemerintahan orde baru berjalan sebuah sistem politik yang represif dan otoriter dengan pola yang *hegemonic*. Akibatnya ruang publik (*public sphere*) masyarakat hilang karena direnggut oleh kekuatan negara. Dampak lanjutannya adalah berkembangnya budaya bisu dalam masyarakat, sehingga proses demokratisasi terganggu karena sikap kritis diberangus. Untuk mengembangkan budaya demokratis dan memperkuat *civil society* dihadapan negara, maka paradigma kritis transformatif merupakan alternatif yang tepat.

Keempat, selama pemerintahan yang menggunakan paradigma keteraturan (*order paradigm*) dengan teori-teori modern yang direpresentasikan melalui ideologi developmentalisme, warga PMII mengalami proses marginalisasi secara hampir sempurna. Hal ini karena PMII dianggap sebagai wakil dari masyarakat tardisional. Selain itu, paradigma keteraturan memiliki konsekuensi logis bahwa pemerintah harus menjaga harmoni dan keseimbangan sosial yang meniscayakan adanya gejolak sosial yang harus ditekan sekecil apapun. Sementara perubahan harus berjalan secara gradual dan perlahan. Dalam suasana demikian, massa PMII secara sosilogis akan sulit berkembang karena tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengembangkan diri, mengimplementasikan kreatifitas dan potensi dirinya.

Kelima, selain belenggu sosial politik yang dilakukan oleh negara dan sistem kapitalisme global yang terjadi sebagai akibat perkembangan situasi, faktor yang secara spesifik terjadi dikalangan PMII adalah kuatnya belenggu dogmatisme agama dan tradisi. Dampaknya, secara tidak sadar telah terjadi berbagai pemahaman yang distortif mengenai ajaran dan fungsi agama. Terjadi dogmatisme agama yang berdampak pada kesulitan membedakan mana yang dogma dan mana yang pemikiran terhadap dogma. Agamapun menjadi kering dan beku, bahkan tidak jarang agama justru menjadi penghalang bagi kemajuan

dan upaya penegakan nilai kemanusiaan. Menjadi penting artinya sebuah upaya dekonstruksi pemahaman keagamaan melalui paradigma kritistransformatif.

Beberapa alasan tersebut dapat menjawab pertanyaan mengapa PMII memilih Paradigma Kritis Tansformatif untuk dijadikan pisau analisis dalam menafsirkan realitas sosial. Karena pada hakekatnya dengan analisis Paradigma Kritis Transformatif (PKT) mengidealkan sebuah bentuk perubahan dari semua level dimensi kehidupan masyarakat (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dll) secara bersama-sama. Hal ini juga tercermin dalam *imagened communit*y (komunitas imajiner) PMII yang mengidealkan orientasi out-put kader PMII yang diantaranya adalah : *Intelektual Organik, Agamawan Kritis, Profesional Lobbiyer, Ekonom Cerdas, Budayawan Kritis, Politisi Tangguh, dan Praktisi Pendidikan yang Transformatif.*

C. PENERAPAN PARADIGMA GERAKAN DALAM KEHIDUPAN PRIBADI DAN BERORGANISASI

Telah dijelaskan diawal, bahwasannya paradigma menempati posisi yang vital bagi seorang individu/kader PMII dalam melakukan analisis terhadap objek kajiannya (realitas sosial). Paradigma yang digunakan antara individu/kader satu dengan yang lainnya mestinya berbeda. Ini dapat terlihat ketika seorang kader dihadapkan dengan suatu masalah yang timbul dalam kehidupan pribadinya. Dengan kata lain, ketika penyakit itu berbeda, maka obatnya pun harus berbeda. Kemampuan seorang kaderdalam menyelesaikan masalah tidak jauh karena dia mampu melihat dan menganalisis sampai pada tawaran aksi dan solusi yang di dapat.

Lebih lanjut, cara pandang seorang kader akan menentukan arah/pergerakan organisasi dalam mengawal perubahan sesuai dengan lokalitas masalah dan medan juang. Maka menjadi penting untuk bagaimana menginternalisasikan pradigma sebagai sebuah transformasi gagasan dan gerakan sampai pada wilayah tindakan praksis ke masyarakat. Pada tahap ini, jelas bahwa Paradigma Krits Transformatif sepenuhnya merupakan proses pemikiran manusia. Menjadikan Paradigma Kritis Transformatif sebagai pisau analisis, metode berpikir dalam memandang persoalan harus diimbangi dengan penguatan dalam basis paradigma itu sendiri. Artinya ruang-ruang diskursus

kader dalam berorganisasi harus tetap dipertahankan, sehingga tawaran-tawaran langkah/gerakan yang muncul dapat berjalan rapi dan massif.

Strategi gerakan PMII harus bisa terkonsolidasikan dengan menumpukan kekuatan yang masif demi mengantisipasi perubahan di masa mendatang dengan tigalini, yaitu global, nasional dan lokal. Katakanlah, saat ini kader PMII hendak berjuang pada level kampus (ranah lokal). Pada level ini, strategi gerakan PMII masih bertumpu pada kontsalasi organisasi Intra kampus. Gerakan semacam ini bukanlah salah satu alternatif pilihan yang dapat di lakukan. Penguasaan PMII terhadap organisasi intra- kampus dilakukan karena memiliki tiga aspek yang dapat membantu pengembangan PMII. Meskipun pada prakteknya seringkali kader PMII yang didistribusikan terjebak kepada heroisme sesaat karena pola pikir yang pragmatis. Kendati demikian, melalui legitimasi organisasi intra-kampus sebenarnya menjadi tangan panjang PMII dalam menekan kebijakan birokrasi yang di nilai tidak berpihak kepada seluruh mahasiswa.

Keberpihakan gerakan PMII dalam ranah perjuangan di basis kampus (lokal) di dasarkan pada kemampuan paradigma yang telah di susun. Kerangka paradigma kritis transformatif terbukti mendekatkan para kader-kader PMII pada sebuah bentuk perubahan dari setiap medan juang yang di hadapi. Dengan begitu, proses implementasi paradigma sebagai sebuah strategi gerakan dalam berorganisasi memberikan dampak yang positif kepada kader PMII, karena dapat menganlisa setiap persoalan secar jernih melalui pijakan dari teori kritis.

PKD KOMSUHA 2021

MATERI IV
ANALISIS WACANA DAN MEDIA

A. Pengertian

Wacana adalah komunikasi kebahasaan yang terlihat sebagai sebuah pertukaran di antara pembicara dan pendengar, sebagai sebuah aktifitas personal dimana bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya. (Hawthorn 1992). Di sini ada beberapa perbedaan pandangan. Mohammad A. S. Hikam dalam suatu tulisannya telah membahas dengan baik perbedaan paradigma analisis wacana dalam melihat bahasa ini yang akan diringkas sebagai berikut :

Paling tidak ada tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. Pandangan pertama, diwakili oleh kaum positivisme-empiris, oleh penganut aliran ini, bahasa dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan obyek di luar dirinya. Pengalaman-pengalaman manusia dianggap dapat secara langsung diekspresikan melalui penggunaan bahasa tanpa ada kendala atau distori, sejauh ia dinyatakan dengan memakai pernyataan-pernyataan yang logis, sitaksis, dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiri. Dalam kaitannya dengan analisis wacana, konsekuansi logis dari pemahaman ini Istilah analisis wacana adalah istilah umum yang dipakai dalam banyak disiplin ilmu dan dengan berbagai pengertian. Meskipun ada gradasio yang besar dari berbagi definisi, titik singgungnya adalah analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai bahasa/pemakaian bahasa. Bagaimana bahasa dipandang dalam analisis wacana? sebelum lebih jauh ada beberapa pengertian terkait dengan analisis wacana itu sendiri, di antaranya yaitu:

Wacana merupakan sebuah percakapan khusus yang alamiah formal dan pengungkapannya diatur pada ide dalam ucapan dan tulisan ; pengungkapan dalam bentuk sebuah nasihat, risalah, dan sebagainya. (Longman Dictionary of vthe English Language)

Wacana ialah rentetan kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan proposisi yang lainnya, membentuk suatu kesatuan, sehimgga terbentuklah makna yang serasi diantara kalimat-kalimat itu. (J. S. Badudu 2000)

Wacana adalah komunikasi kebahasaan yang terlihat sebagai adalah orang

tidak perlu mengetahui makna-makna subjektif atau nilai-nilai yang mendasari pernyataanya. Oleh karena itu, tata bahasa, kebanaran sintaksis adalah bidang utama dari aliran positivisme-empiris tentang wacana. Analisis wacana dimaksudkan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama.

Pandangan kedua, disebut sebagai konstruktivisme. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi. Aliran ini menolak pandangan positivisme- empirisme yang memisahkan subyek dan obyek bahasa. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas obyektif belaka dan yang dipisahkan dari subyek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. oleh karena itu, analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna- makna tertentu. Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subyek yang mengemukakan suatu pernyataan.

Pandangan ketiga, disebut sebagai pandangan kritis. Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subyek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi di dalamnya. Oleh karena itu, analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa, batasan- batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai, topik apa yang dibicarakan.

Dalam analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis / CDA), wacana di sini tidak semata dipahami sebagai studi bahasa. Pada akhirnya analisis wacana memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, tetapi bahasa yang dianalisis di sini agak berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Bahas dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. konteks di sini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan.

Menurut Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis melihat wacana, pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari

praktik sosial. Praktik wacana bisa jadi menampilkan efek ideologi, ia dapat memproduksi dan memproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas melalui mana perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan melalui wacana, sebagai contoh, keadaan yang rasis, seksis, atau ketimpangan dari kehidupan sosial dipandang sebagai suatu *common sense*,suatu kewajaran/alamiyah dan memang seperti itu kenyataannya.

B. TINDAKAN

Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (action). Dengan pemahaman semacam ini mengasosiakan wacana sebagai bentuk interaksi. Orang berbicara atau menulis bukan ditafsirkan sebagai ia menulis atau berbicara untuk dirinya sendiri, seperti orang sedang mengigau atau di bawah hipnotis. Seseorang berbicara atau menulis mempunyai maksud tertentu, baik besar maupun kecil. Wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.

Konteks analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana, seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana di sini dipandang diproduksi, dimengerti dan dianalisis pada suatu konteks tertentu.

1. Histori
2. Kekuasaan
3. Ideologi

Opini wacana, Analisa wacana harus :

- ✓ Obyektif, kalau tidak obyektif maka terjadi perbedaan justifikasi benar atau salah
- ✓ Wacana berkembang tidak lepas dari nilai *(value)*
- ✓ Wacana berkembang tidak lepas dari faktor kepentingan
- ✓ Setiap wacana yang berkembang pasti mempengaruhi massa/tanggapan massa

C. ANALISIS MEDIA

1. Pengantar Analisis Media

Kajian komunikasi/kajian media dapat ditelusuri: (Littlejohn, 2002:4). Pertama, sejak zaman Yunani yang berbasis pada retorika (logika dan bahasa) yang berlanjut dengan kajian sejarah dan kultural, dan yang terakhir dengan perspektif kritis (termasuk ideologis) aliran pemikiran Birmingham di Inggris dan Frankfurt di Jerman. Kedua, dari akar Amerika Serikat yang berbasis empirisisme dengan aliran pemikiran pragmatisme.

Secara sederhana, pendekatan dalam kajian media memperkenalkan dua dimensi, yaitu pragmatis sosial dan kultural. Littlejohn menggunkan istilah "***scientific***" dan "***humanistic***" dimana masing-masing merupakan sebutan populer dari dimensi pragmatis sosial dan kultural. Pada dasarnya perbedaan pendekatan kajian komunikasi disebabkan karena masing-masing pengkaji dari kajian akademik ini mendefinisikan subyek kajiannya secara berbeda. Pendekatan pragmatis sosial dan kultural melahirkan dua aliran dalam kajian Ilmu Komunikasi yang bertolak dari perbedaan dimensi yang menjadi perhatian dalam kajian.

Aliran pertama melihat fenomena komunikasi sebagai pemyampaian pesan (***transmission of message***) dalam konteks interaksi sosial, sedangkan aliran kedua menyebut komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna (***product and excange of meaning)*** dalam konteks kultural.

Menurut Rogers, secara garis besar media dapat digolongkan secara fisik ke dalam 3 kelompok besar, yaitu : (Siregar, 2008: 23)

1. Media sosial,
2. Media massa
3. Media interaktif

Dengan cara lain, fenomena komunikasi dapat dilihat sebagai instrument dalam hubungan sosial yang diwujudkan dalam format verbal dan nonverbal atau format visual dan nonvisual. Masing-masing format ini membawa tuntutan teknis yang berkonteks pada sifat bawaan media yang digunakan.

Media sosial memiliki sifat bawaan yang bertumpu pada faktor fisik manusia, media massa dengan landasan faktor perangkat teknologi mekanis dan elektronis, dan media interaktif dengan tumpuan pada

perangkat teknologi telekomunikasi dan komputer multimedia. Masing-masing media hadir dengan bawaannya dan bermula dari sinilah kaidah dalam komunikasi disesuaikan dengan faktor fisik manusia dan teknologi sebagai perpanjangan fisik manusia.

Dorongan untuk menyelenggarakan studi media perlu dimiliki dalam pengembangan disiplin Ilmu Komunikasi. Untuk itu, perlu ditumbuhkan kesadaran tentang titik pijak dalam melakukan kajian proses mediasi yang berada dalam berbagai konteks.

2. Pokok Pertimbangan Untuk Analisis Media

Pada dasarnya, ranah keilmuan berupa konsep teoritis, baik teori pengetahuan sosial maupun aplikatif. Kajian Media pada dasarnya merupakan pengembangan konsep teoritis ini sehingga dapat mengenali karakter media (teori pengetahuan sosial) atau pun pola teknis dalam media (teori aplikatif).

Kajian konvensional atau –sekarang boleh disebut- tradisional bertumpu pada formula Lasswel, yang diperkenalkan pada tahun 1948, yang merumuskan obyek kajian Ilmu Komunikasi sebagai berikut:

- ✓ ***Who*** (Siapa)
- ✓ ***Says What*** (Bicara tentang apa)
- ✓ ***In Which Channel*** (Menggunakan saluran apa)
- ✓ ***To Whom*** (Kepada siapa)
- ✓ ***With What Effect?*** (Laswell, 1971).

Selain itu, fenomena komunikasi sering dikutip dari buku teks klasik, yaitu model komunikasi yang bersifat liniar: ***Source – Message – Channel – Reciever.***

Pada dasarnya kajian yang dimaksud untuk mengetahui tindakan dalam proses komunikasi bersifat linier dan dititikberatkan pada efektivitas pesan dengan melihat keempat komponen sebagai satuan-satuan kajian.

3. Analisis Isi

Analisis isi *(content analysis)* adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang

memelopori teknik *symbol coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.

Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik/metode penelitian. Holsti menunjukkan tiga bidang yang banyak mempergunakan analisis isi, yang besarnya hampir 75% dari keseluruhan studi empirik, yaitu penelitian sosioantropologis (27,7 persen), komunikasi umum (25,9%), dan ilmu politik (21,5%). Sejalan dengan kemajuan teknologi, selain secara manual kini telah tersedia komputer untuk mempermudah proses penelitian analisis isi, yang dapat terdiri atas 2 macam, yaituperhitungan kata-kata, dan "kamus" yang dapat ditandai yang sering disebut General Inquirer Program.

1. Analisis isi tidak dapat diberlakukan pada semua penelitian sosial. Analisis isi dapat dipergunakan jika memiliki syarat berikut. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman, naskah/manuscript).
2. Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut.
3. Peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan/data-data yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas/spesifik.

PKD KOMSUHA 2021

MATERI V
ANALISIS SOSIAL

A. KONSEP ANALISIS SOSIAL

Analisis sosial merupakan usaha untuk menganalisis sesuatu keadaan atau masalah sosial secara objektif. Analisis sosial diarahkan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai situasi sosial dengan menelaah kaitan-kaitan histories, structural dan konsekuensi masalah. Analisis sosial akan mempelajari struktur sosial, mendalami fenomena-fenomena sosial, kaitan-kaitan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama. Sehingga akan diketahui sejauh mana terjadi perubahan sosial, bagaimana institusi sosial yang menyebabkan masalah-masalah sosial, dan juga dampak sosial yang muncul akibat masalah sosial.

B. RUANG LINGKUP ANALISIS SOSIAL

Pada dasarnya semua realitas sosial dapat dianalisis, namun dalam konteks transformasi sosial, maka paling tidak objek analisa sosial harus relevan dengan target perubahan sosial yang direncanakan sesuai dengan perubahan. Secara umum objek sosialyang dapat dianalisis antara lain :

- Masalah-masalah sosial, seperti : kemiskinan, pelacuran, pengangguran,kriminalitas.
- System sosial, seperti : tradisi, usaha kecil atau menengah, system pemerintahan,system pertanian.
- Lembaga-lembaga sosial, seperti : sekolah, layanan rumah sakit, lembaga pedesaan.
- Kebijakan public, seperti : dampak kebijakan BBM, dampak perlakuan sebuah UU

C. PENTINGNYA TEORI SOCIAL

Teori dan fakta berjalan secara simultan, teori sosial merupakan refleksi dari fakta sosial, sementara fakta sosial akan mudah dianalisis melalui teori-teori sosial. Teori sosial melibatkan isu-isu mencakup filsafat, untuk memberikan konsepsi-konsepsi hakekat aktifitas sosial dan perilaku manusia yang ditempatkan dalam realitas empiris. Charles lemert (1993) dalam sosial theory : the Multicultural And Classic Readings menyatakan bahwa teori sosial memang merupakan basis dan pijakan teknis untuk bisa survive.

Teori sosial merupakan refleksi dari sebuah pandangan dunia tertentu yang berakar pada positivisme. Menurut Antony Giddens secara filosofis terdapat dua macam analisis sosial.

1. Analisis institusional, yaitu ansos yang menekan pada keterampilan dan kesetaraan actor yang memperlakukan institusi sebagai sumber daya dan aturan yang diproduksiterus-menerus.
2. Analisis perilaku strategis, adalah ansos yang memberikan penekanan institusi sebagai sesuatu yang diproduksi secara sosial.

D. LANNGKAH-LANGKAH ANSOS

1. Memilih dan menentukan objek analisis

   Dalam memilih masalah, harus berdasarkan pada partimbangan rasional yang berarti realitas akan apa yang dianalisis merupakan masalah yang memiliki signifikan sosialdan sesuai dengan visi misi organisasi.
2. Pengumpulan data atau informasi penunjang

   Menganalisis masalah secara utuh maka perlu didukung dengan data dan informasi penunjang yang lengkap serta relevan, baik melalui dokumen, media masssa, observasi maupun investigasi untuk menguji validitas data.
3. Identifikasi dan analisis masalah

   Setelah data terkumpul, maka perlu dilakukan pemetaan beberapa variable. Seperti aspek politik, sosial, ekonomi budaya serta agama.
4. Mengembangkan presepsi

   Setelah mengidentifikasi dari berbagai aspek selanjutnya dikembangkan presepsi atas masalah sesuai cara pandang yang objektif. Dari tahap ini akan muncul beberapa kemungkinan implikasi dari konsekuensi dari objek masalah, serta pengembangan beberapa alternative sebagai kerangka tidak lanjut.
5. Menarik kesimpulan

   Pada tahap ini akan mengajak kita mengetahui tentang akar masalah, pihak mana saja yang terlibat, pihak yang diuntungkan dan dirugikan, serta akibat yang muncul baik dari segi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan paradigm tindakan yang bisa dilakukan untuk proses perubahan sosial

E. PERANAN ANSOS DALAM STRATEGI GERAKAN PMII

Paradigma gerakan PMII adalah kritis transformatif, artinya PMII dituntut peka dan mampu membaca realitas sosial secara objektif (kritis), sekaligus terlibat aktif dalam aksi perubahan sosial (transformative). Transformative sosial yang dilakukan PMII akan berjalan secara efektif jika kader PMII memiliki kesadaran kritis dalam melihat realitas sosial. Kesadaran kritis akan muncul apabila dilandasi dengan cara pandangan luas terhadap realitas sosial. Untuk dapat melakukan pembacaan sosial secara kritis, mutlak diperlakukan kemampuan analisis sosial secara baik. Artinya, strategi gerakan PMII dengan paradigm kritis transformative akan dapat terlaksana secara efektif apabila dipandang dengan kematangan dalam analisis sosial.

PKD KOMSUHA 2021

MATERI VI
TEHNIK LOBBY DAN MEMBANGUN JARINGAN

A. PENGERTIAN LOBBY

Berbicara mengenai lobi, secara umum, selama manusia itu melakukan proses komunikasi dengan orang lain, maka disitulah kegiatan lobi itu terjadi dan kadangkala kita juga melakukan tanpa kita sadari. Istilah "lobi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki banyak pengertian; "ruang teras di dekat pintu masuk hotel (bioskop, apartemen, dll), yang biasanya dilengkapi dengan perangkat meja, kursi, dan perabot lainnya", atau "kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi orang lain yang kaintannya dengan pemungutan suara menjelang pemilihan ketua organisasi, hingga Presiden".

Sama halnya definisi tentang apa itu "lobi" menurut Anwar (1997) definisi yang lebih luas adalah suatu upaya informal dan persuasif yang dilakukan oleh satu pihak (perorangan, kelompok, Swasta, Pemerintah) yang memiliki kepentingan tertentu untuk menarik dukungan dari pihak-pihak yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang, sehingga target yang diinginkan tercapai. Pendekatan secara persuasif menurut pendapat ini lebih dikemukakan pada pihak pelobi dengan demikian dibutuhkan keaktifan untuk pelobi untuk menunjang kegiatan tersebut.

Lebih jauh mengenai makna dan bahasan 'lobi' tersebut, Andini (2012) melihat bahwa kegiatan lobi sarat akan kegiatan politis, atau dengan kata lain bahwa 'orang yang mempunyai hajat (urgency) membangun relasi emosiaonal demi terwujudnya suatu profit. berlandaskan asal kata lobi yang berarti teras atau ruang depan yang terdapat di hotel-hotel, tempat dimana para tamu duduk-duduk dan bertemu dengan santai kemungkinan kata lobi melatar belakangi perkembangan istilah "melobi" yang terjadi karena kebiasaan para anggota parlemen di Inggris yang biasa berkumpul di lobi ruang sidang dan memanfaatk1an pertemuan di ruang tersebut untuk melakukan berbagai pendekatan, diantara persidangan.

Dan dapat disimpulkan secara kongkrit bahwa lobi adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan individu ataupun kelompok dengan tujuan

mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi.

B. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM LOBBY

1. Pelobi

   Pelobi melakukan kegiatan lobi dengan tujuan memengaruhi mereka yang menjadi sasaran lobi. Dalam melakukan kegiatannya pelobi bisa dilakukan oleh individual atau kelompok. Pelobi biasanya melakukan tekanan pada saat kegiatan lobi tengah berlangsung kepada sasaran lobi untuk memperoleh hal-hal yang diinginkan secara halus.

2. Pihak yang dilobi

   Pihak yang dilobi, atau sering juga disebut sasaran lobi. Mereka biasanya merupakan individu berpengaruh, kelompok, lembaga pemerintahan, maupun lembaga atau organisasi pemerintah hingga pihak swasta pun. Pihak yang dilobi juga bisa jadi merupakan bagian dari usaha untuk memperoleh teman yang berguna, bagi pelobi, maupun organisasi atau perusahaan tempat pelobi bergabung atau bekerja.

3. Contoh yang biasanya terlibat kegiatan lobi

   - Ada beberapa elemen yang sudah memang sering terlihat dan lihai melakukan teknik lobi.
   - Golongan masyarakat yang memiliki wawasan dan pengetahuan cukup luas dengan reputasi baik pada kecakapannya di bidang tersebut.
   - Anggota organisasi yang memiliki kontak yang paling penting dengan pihak-pihak legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
   - Tokoh masyarakat/ LSM yang sudah dikenal.
   - Kalangan jurnalis (wartawan, reporter, redaktur) yang berpengaruh dan memiliki kekuatan untuk membentuk opini
   - Pembuat undang-undang, pejabat pemerintahan, pimpinan partai politik, dan lain sebagainya.

PKD KOMSUHA 2021

C. TUJUAN DAN MANFAAT LOBBY

Tentunya dari kegiatan lobi memiliki tujuan yang memang secara subtanstif dinilai sangat penting; Tujuan melobi adalah aktivitas (komunikasi) yang dilakukan untuk mempengaruhi (meyakinkan) orang atau pihak lain, sehingga orang atau pihak lain itu sependapat dan seagenda dengan kita. Sedangkan untuk manfaat yang bisa diperoleh sebagai berikut;

- Mempengaruhi pengambil keputusan agar keputusannya tidak merugikan para pelobi dari organisasi atau lembaga bisnis.
- Lobi juga berfungsi untuk menafsirkan opini pejabat pemerintah yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan perusahaan.
- Memprediksi apa yang akan terjadi secara hukum dan memberirekomendasi pada perusahaan agar dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan baru dan memanfaatkan ketentuan baru tersebut.
- Menyampaikan informasi tentang bagaimana sesuatu kesatuan dirasakan oleh perusahaan, organisasi atau kelompok masyarakat tertentu
- Meyakinkan para pembuat keputusan bahwa pelaksanaan peraturan membutuhkan waktu untuk perizinan.

D. NORMA DAN ETIKA DALAM MELAKUKAN LOBBY

Seringkali dalam lobi tersimpan juga unsur negosiasi atau lobi berperan sebagai langkah awal dari negosiasi. Kekuatan negosiasi terletak pada fokusnya, yaitu yang bertumpu pada pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan. Kekuatan inti negosiator ulung adalah kemampuannya untuk memotivasi pihak lain atau yang diajak berunding untuk menerima tujuan negosiasi. Keterampilan bemegosiasi terletak pada kemampuan untuk memunculkan kekuatan persuasi.

Melobi adalah bentuk aktif dari kegiatan lobi, dimana pendekatan-pendekatan dilakukan secara tidak resmi. Melobi pada dasarnya merupakan usaha yang dilaksanakan untuk memengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandangan positif terhadap topik lobi, dengan demikian diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan.

Keberhasilan lobi pada satu pihak sama artinya dengan kerugian pada pihak lain. Pihak lain disini bisa jadi: kompetitor, masyarakat, ataupun mitra bisnis. Sebagai profesi, pelobi masih dianggap negatif bagi sebagian masyarakat

PKD KOMSUHA 2021

kita karena ada anggapan bahwa fungsi lobi untuk mewujudkan kepentingan pelobi saja dan bukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Sasaran pelobi sebagian besar adalah pejabat pemerintah, hal ini membuka peluang pejabat tersebut melakukan penyalahgunan wewenang, dimana satu pihak diuntungkan dan pihak lain dikalahkan dengan mendapatkan imbalan atau kompensasi tertentu berupa fasilitas, kemudahan, dan kemewahan. Kecenderungan negatif lobi didalamnya termasuk "uang suap".

Oleh karena itu, dalam melakukan lobi tetap harus menggunakan norma dan etika yang sepatutnya, dan yang terpenting, dalam melakukan lobi kedua pihak sama-sama memiliki kesepakatan dan tanpa adanya unsur-unsur lain yang akan berdampak di kemudian hadi dalam melakukan suatu lobi.

E. STRATEGI MELAKUKAN LOBBY DAN TEKNIKNYA

Perlunya langkah cerdas dan penuh pertimbangan menjadi landasan utama melakukan lobi, sehingga rencana lobi bisa berjalan dengan baik. Diantara strategi lobi ialah;

1. Kenali objek yang dituju, sehingga mengetahui seluk-beluk objek yang akan dituju. Hal ini sangat perlu karena teknik yang akan dipergunakan tergantung dari siapa yang akan dilobi. Untuk mencapai keberhasilan yang optimal, maka pelobi harus memahami atau mengenal dengan baik sifat, sikap dan pandangan bahkan mungkin perilaku orang yang akan dilobi.
2. Jika melalui orang ketiga, maka kita harus benar-benar memilih orang yang tidak memiliki masalah dengan pihak yang akan kita lobi, akan lebih baik jika kita mencari orang yang dekat dan berhubungan baik dengan target lobi. Serta orang yang paham betul tentang hal yang akan kita lobi kan dengan menggunakan alasan-alasan yang mendukung. Pengenalan ini diperlukan agar bisa ditentukan cara pendekatan yang akan dilakukan, atau pemilihan teknik komunikasi yang akan dipergunakan. Mendekati orang yang mudah tersinggung dan selalu serius dengan mendekati orang yang penyabar dan suka bercanda, tentu sangat berbeda. Kekeliruan atas hal ini akan berakibat fatal.
3. Persiapan diri, segala sesuatu harus dipersiapkan baik mental dan kepercayaan diri agar tidak gugup ketika melakukan lobi.

Kesan pertama memiliki dampak yang signifikan ke depannya, maksudnya ialah bahwa kesan pertama harus mempunyai pesan yang baik antara dua belah pihak yang sedang melakukan lobi. Seorang pelobi harus mampu menampilkan diri dengan baik, sehingga menimbulkan kesan yang positif bagi pihak yang dilobi Style cukup penting untuk menunjukkan siapa diri kita, jika akan melobi orang-orang penting penampilan luar bisa menjadi modal awal. Penampilan diri ini tidak berarti semata-mata hanya bersifat fisik (lahiriah) seperti pakaian dan sebagainya, tetapi juga kepribadian dan intelektualitas.

4. Memperhatikan situasi dan kondisi

Situasi dan kondisi yang ada atau melingkupi suasana lobbying harus diperhatikan oleh pelobi, demikian pula perubahan-perubahan yang terjadi. Hal ini terutama sangat penting dalam penggunaan cara menyampaikan pesan. Di tempat umum misal di restoran, atau di tempat terbuka misal dalam olahraga cara berbicara yang dipakai tentu berbeda dengan apabila dirumah atau dikantor. Tentu tidak tepat berbicara keras-keras diantara banyak orang lain, sementara dengan berbisikbisik di dalam rumah justru akan menimbulkan kesan yang negatif bagi tuan rumah. Pada saat pembicaraan tengah berlangsung dan dianggap lancarpun, pelobi harus tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang sewaktu-waktu bisa berubah. Jangan meneruskan ketika ada orang lain datang atau alihkan pada topik lain dengan cara yang wajar, karena meskipun mungkin pelobi tidak berkeberatan, tetapi mungkin yang dilobi yang tidak berkenan.

Teknik melobi

Ada beberapa cara-cara yang mungkin bisa menjadi rujukan pembaca sebelum melakukan tindakan lobi:

1. Tidak langsung

Lobi bisa dilakukan dengan cara tidak langsung hal ini mengandung pengertian tidak harus satu pihak atau satu orang yang berkepentingan menghubungi mendekati sendiri pihak lain yang mau dilobi. Pendekatan itu bisa dilakukan dengan perantara pihak lain (terutama yang dianggap punya akses atau mempunyai hubungan yang dekat dengan pihak yang dilobi). Dalam hal seperti ini maka satu hal yang sangat penting diperhatikan oleh pihak yang

melobi adalah kepercayaan atau kredibilitas pihak ketiga yang dijadikan perantara atau penghubung tersebut.

Kendala lain jangan sampai gara-gara lobbying yang dilakukan dengan menggunakan jasa pihak lain (pihak ketiga) justru merusak hubungan yang sudah ada, karena kesalahan atau ulah pihak ketiga tersebut. Cari orang yang tidak memiliki masalah dengan pihak yang akan kita lobi. Namun, Kendala lain dalam menggunakan cara tidak langsung adalah pihak ketiga atau perantara tersebut tidak selalu menguasai atau mengerti permasalahan atau objek yang jadi sasaran. Disamping itu apabila objek yang jadi sasaran bersifat rahasia maka akan membuka kemungkinan bagi kebocoran terhadap rahasia tersebut.

2. Langsung

Berbeda dengan cara tidak langsung maka disini pihak yang berkepentingan (berusaha) harus bisa bertemu atau berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang dilobi dengan kata lain pihak-pihak yang terlibat bertemu atau berkomunikasi secara langsung tidak menggunakan perantara atau pihak ketiga. Cara langsung ini jelas lebih baik dari pada cara tidak langsung tetapi kendalanya adalah bahwa :

- Pihak pihak yang terlibat tidak selalu saling mengenal.
- Tidak semua orang mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik.
- Kesan terhadap pribadi tidak selalu sama dengan dengan kesan terhadap lembaga. Jelasnya seseorang mungkin saja kurang suka atau kurang menghormati orang tertentu tetapi terhadap lembaga yang dipimpinnya dia tidak ada masalah dalam hal seperti ini tentu akan lebih baik apabila yang melakukan lobi adalah orang lain atau staf pada lembaga tersebut.

3. Terbuka

Yang dimaksud dengan cara terbuka adalah lobi yang dilakukan tanpa ketakutan diketahui orang lain. Lobi yang dilakukan secara terbuka memang tidak harus berarti dengan sengaja diekspos atau diberitahukan kepada khalayak, tetapi kalaupun diketahui masyarakat bukan merupakan masalah.

Lobi dengan cara terbuka ini biasanya dilakukan oleh dan diantara kelompok misalnya pendekatan yang dilakukan oleh OPP atau partai politik

tertentu pada salah satu organisasi massa atau sebaliknya dan antara suatu Ormas pada Ormas yang lain.

4. Tertutup

Yang dimaksud lobi dengan cara tertutup adalah apabila lobi dilakukan secara diam- diam agar tidak diketahui oleh pihak lain apalagi masyarakat. Lobi dengan cara ini biasanya bersifat perorangan yaitu yang dilakukan secara pribadi atau oleh seseorang pada orang tertentu. Lobi cara ini dilakukan karena apabila sampai diketahui oleh pihak lain maka bisa berakibat negatif atau merugikan pihak yang melakukan lobi tersebut maupun pihak yang dilobi.

F. MEMBANGUN JARINGAN

Membangun jejaring sosial atau social networking menjadi kebutuhan yang sukar untuk disangkal ketika seseorang telah menyelesaikan jenjang belajarnya di tingkat Perguruan Tinggi ataupun di bawahnya. Jejaring yang dimaksud adalah proses untuk saling memenuhi perihal keuntungan secara personal atau kelompok (instansi). Selanjutnya, dipaparkan ada beberapa rekomendasi yang bisa menjadi pertimbangan;

1. Bisnis

Bisnis berasal dari bahasa inggris “business” yang berarti usaha, perdagangan, usaha komersial. Bisnis juga berarti “aktivitas guna meningkatkan nilai tambah barang dan jasa.” Kendala yang sering dihadapi di dalam bisnis adalah menjalin relasi yang luas. Anda harus bisa membuka setiap peluang. Jika anda bisa melakukan hal yang besar, maka akan anda mendapatkan hal yang jauh lebih besar.

Jika anda adalah seorang pebisnis tulen, maka hal di atas sangat mudah anda lakukan. Tetapi jika anda ragu-ragu, tidak ada salahnya untuk mencoba. Apalagi di zaman teknologi seperti sekarang, dimana manusia bisa berhubungan lewat media sosial, itu bisa membantu kita memperluas jangkauan untuk bisnis kita.

2. Politik

Mendengar istilah ‘politik’ maka akan terlintas di pikiran pembaca; kegiatan yang sangat dekat pada hal-hal kenegaraan, partai, pemilihan umum, bahkan berujung pada konsekuensi ‘harus korupsi’. Cukup banyak dari kalangan

aktivisis mahasiswa yang memutuskan menjadi politisi selesai tamat jenjang pendidikan S1. Bagi mereka menjadi politisi tidak serumit dibanding harus menjadi dosen atau pengusaha, hanya cukup bermodal relasi (dengan senior) dan cakap berbicara maka kemungkinan besar akan lancar menjadi seorang politisi.

Hal tersebut merupakan perspektif yang penting terutama dalam politik karena politik merupakan salah satu cara untuk membangun negara. Jangan karena politik biasa dianggap kotor, kita menjadi tidak peduli atau apatis dengan politik. Justru karena itu, pemuda-pemudi baru harus mulai bermunculan, mengambil alih, berkontribusi dengan kredibilitas, dan melangkah dengan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab.

3. Akademisi

Pilihan alternatif yang super idealis untuk mahasiswa yang memiliki kepribadian dan sikap yang 'tidak terlalu suka organisasi'. Mindset yang dibangun ialah 'bagaimana cara saya bisa lulus cepat, paham banyak teori, dan prestasi akademik lancar'. Dan kemungkinan besar mereka hanya berkutat pada masalah 'metode mengajar, kurikulum, pengembangan institusi, penelitian atau pendampingan masyarakat, hingga akreditasi lembaga'.

Semua proses atau pun keputusan nantinya ingin terjun pada pekerjaan apa, yang paling penting ialah cara dan startegi dalam membangun relasi atau networking. Karena hal tersebut akan mempengaruhi pada kelancaran pekerjaan ke depannya.

PKD KOMSUHA 2021

MATERI VII
MANAJEMEN AKSI

A. PENGERTIAN MANAJEMEN AKSI

Pengertian Secara umum Manajemen memiliki pengertian pengelola potensi atau isi di dalam sebuah wadah atau komunitas. Aksi berasal dari kata "Action" yang bermakna "Gerak", Gerakan adalah berpindahnya energi, volume, tempat dan waktu dari kondisi semula menuju kondisi kemudian. Aksi di dalam dunia organisasi pergerakan dapat diterjemahkan sebagai segala pikiran dan perbuatan/tindakan yang mengarah pada capaian-capaian terhadap tujuan perjuangan itu sendiri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen aksi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengatur suatu massa aksi agar tetap terkoordinir dan sesuai dengan rencana dan target awal hingga mencapai hasil yang diinginkan.

Aksi umumnya dilatarbelakangi oleh matinya jalur penyampaian aspirasi atau buntunya metode dialog.. Dalam trias politika, aspirasi rakyat diwakili oleh anggota legislatif. Namun dalam kondisi pemerintahan yang korup, para legislator tak dapat memainkan perannya, sehingga rakyat langsung mengambil „jalan pintas" dalam bentuk aksi. Aksi juga dilakukan dalam rangka pembentukan opini atau mencari dukungan publik. Dengan demikian isu yang digulirkan harapannya dapat menjadi snowball.

Salah satu bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah serta penyampaian pesan kepada masyarakat adalah dengan melakukan aksi massa. Dalam negara yang berdemokrasi, aksi menjadi cara yang dilegalkan, oleh karena itu lembaga pendidikan seperti universitas juga harus berperan sebagai guardian of value dari pemerintah serta masyarakat. Mengapa cara yang dipilih adalah aksi ? karena aksi berdampak pada dua sisi, yakni sisi ketersampaian pesan kepada pihak yang diinginkan serta penyadaran masyarakat atas sebuah isu. Sehingga aksi masih menjadi cara yang relevan untuk dilakukan.

B. ATURAN HUKUM

UU. NO. 9 TAHUN 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Beberapa hal; penting dalam undang-undang ini :

1. Penyampaian pendapat dimuka umum tidak boleh dilaksanakan ditempat

tertentu, antaralain Istana Presiden (Radius 100m), tempat ibadah (Radius 150 m), Instalasi militer dan obyek vital nasional (Radius 500 m) dari pagar luar.

2. Dilarang membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum (Sajam,Molotov, dll)
3. Menyampaikan laporan atau pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian setempat.
4. Surat pemberitahuan memuat tentang tujuan dan maksud aksi, waktu dan acara, rute, jumlah massa, penanggung jawab aksi dimana dalam UU ini 100 massa 1 orang penanggung jawab.

C. MEKANISME LAHIRNYA KEPUTUSAN AKSI

Keputusan aksi sebaiknya dilakukan dengan matang yaitu bisa menggunakan analisis SWOT-nya Organisasi intra kampus (OMIK) mempunyai mekanisme yang berbeda namun hampir sama dengan Mahasiswa Organisasi extra kamous (OMEK). Di Extra jalur pengambilan keputusan jalur pengambilan keputusan lebih pendek sehingga keputusan Aksi dapat lebih cepat di eksekusi. Secara garis besar mekanisme lahirnya keputusan aksi adalah sebgai berikut : Diskusi awal (Tim/Dep. Khusus: bidang sospol), diteruskan ke : Diskusi lanjutkan (pelibatan kader, (unsur UKM), mengahadirkan pakar, penerbitan pres release), laluPembentukan Tim Teknis Aksi Aksi di lapangan.

D. BENTUK DAN SUSUNAN MASSA AKSI

Bentuk Aksi sebgai berikut Aksi Demonstrasi, Aksi Mogok makan, Aksi Damai, AksiMimbar bebas, Aksi Theatrikal, dll

E. TAHAPAN AKSI

Dalam melaksanakan aksi, harus mempertimbangkan beberapa hal penting. baik perangkat yang mesti dipersiapkan maupun tahapan-tahapan yang harus dilalui bersama. Aksi memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, antar lain:

a) Pra Aksi

1. Persiapan dan Pematangan issue
2. Menyusun Tim Aksi

   Perangkat aksi adalah bagian kerja partisipan massa aksi. Perangkat massa aksi disesuaikan dengan kebutuhan, biasanya diperlukan perangkat

sebagai berikut:

- **Koordinator lapangan.**

  Korlap bertugas memimpin aksi di lapangan, berhak memberikan instruksi kepada peserta aksi/massa. Keputusan untuk memulai ataupun membubarkan/mengakhiri massa aksi ditentukan oleh korlap.

- **Orator**

  Orator adalah orang yang bertugas menyampaikan tuntutan-tuntutan massa aksi dalam bahasa orasi, serta menjadi agitator yang membakar semangat massa.

- **Humas**

  Perangkat aksi yang bertugas menyebarkan seluas-luasnya perihal massa aksi kepada pihak-pihak berkepentingan, terutama pers.

- **Negosiator**

  Negosiator berfungsi sesuai dengan target dan sasaran aksi. Misalnya pendudukan gedung DPR/DPRD sementara target tersebut tidak dapat tercapai karena dihalangi aparat keamanan, maka negosiator dapat mendatangi komandannya dan melakukan negosiasi agar target aksi dapat tercapai. Karenanya seorang negosiator hendaknya memiliki kemampuan diplomasi.

  1. Kurir (menjembatani komunikasi antara massa aksi dengan massa aksi lain)
  2. Advokasi (memberi perlindungan hukum apabila tjd chaos)
  3. Asisten teritorial/keamanan/sweaper/dinamisator lapangan/intelejen
  4. Logistic dan medical rescue.
  5. Dokumentasi
  6. Tim kreatif
  7. Membuat press release (Berisikan pesan dan tuntutan dari isu yang telahdibahas)
  8. Mengumpulkan massa (estimasi)
  9. Menghubungi media
  10. Mempersiapkan perangkat/kelengkapan aksi (spanduk, bendera, press release,perangkat dokumentasi, poster, pengeras suara seperti

PKD KOMSUHA 2021

TOA danmobil sound system, dan identitas peserta aksi, dan failitas teatrical.)

11. Skenario dan pembagian peran
12. Menghubungi pihak kepolisian untuk perizinan

b) Aksi

Dalam tahapan inilah peran, fungsi dari perangkat aksi diaplikasikan sesuai dengan tugas masing-masing, komunikasi serta koordinasi antar perangkat aksi tidak boleh terputus karena perubahan situasi di lapangan sangatlah cepat, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu aksi dapat dihindari, misalnya : Provokasi, Infiltran, Represif aparat, Chaos.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan aksi yakni :

1. Membagikan pesan yang telah dibuat, seperti pamflet dan leaflet.
2. Berorasi dalam perjalanan dan di tempat tujuan akhir, orasi adalah bagian dari penyampaian pesan aksi kepada masyarakat luas.
3. Yel-yel dan menyanyikan lagu. Sebagai penyemangat massa aksi dan mendominasi/ menguasai suasana/ keadaan (situasi dan kondisi).
4. Audiensi ke pihak yang dituju, dilakukan oleh perangkat aksi yang telah ditunjuk, negosiator maupun yang jago dalam beraudiensi.
5. Pembacaan press release. Hal ini biasanya dilakukan pada akhir aksi dan diharapkan dapat diliput media agar pesan yang kita bawa dapat tersampaikan kepada khalayak luas.

c) Paska Aksi

- Absensi, sebagai pemastian terhadap jumlah peserta aksi yang terlibat selama pelaksanan aksi.
- Evaluasi, untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari aksi
- Rekomendasi, dari hasil-hasil yang telah dicapai melalui aksi dapat dikerangkakan menjadi sebuah masukan untuk gerakan yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Peranan kelembagaan organisasi di lingkungan yang dihadapi menjadi mutlak untuk dipersiapkan. Pikiran tanpa praktek hanya akan melahirkan mimpi saja, sedangkan praktek tindakan tanpa pikiran hanya akan melahirkan ugal-ugalan atau anarki gerakan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Bung

PKD KOMSUHA 2021

Karno bahwa gerakan harus Massa Aksi (Massa yang sadar akan pikiran dan perbuatannya) bukan Aksi Massa (Aksi yang gemerlap tampilannya saja atau hanya ikut-ikutan). Program perjuangan organisasi pergerakan yang dipraktekkan dalam Manajemen Aksi dan Propaganda harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

“AKSI TANPA TEORI ADALAH ANARKI, TEORI TANPA AKSIADALAHOMONG KOSONG”

PKD KOMSUHA 2021

MATERI VIII
NAHDLATUN NISA'

Nahdlatul Nisa' secara harfiah berasal dari kata *"Nahdlah"* yang berarti bangkit dan *"Nisa"* yang berarti perempuan. Sehingga secara etimologi Nahdlatul Nisa' dapat dikatakan sebagai kebangkitan perempuan dari masa – ke masa. Istilah "kebangkitan perempuan" ini membungkus istilah Gender dan Feminisme yang nampak liberal.

Muslimat dan Fatayat yang merupakan wadah perjuangan kaum nahdliyin aktif mengikuti perkembangan pemikiran kajian keislaman yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini mengacu pada prinsip egalitarian atau kesetaraan yang terdapat dalam surat *Al – Hujurat* ayat 13 yang berarti,

" *Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki – laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa, dan bersuku – suku supaya kamu saling kenal-mengenal, Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu*." Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Islam memandang kedudukan laki-laki dan perempuan sama, yang membedakan seseorang di hadapan Allah adalah ketakwaan seseorang tersebut.

Gerakan ini bermula pada abad ke-18 di mana saat itu budaya patriarki mengakar dalam kehidupan masyarakat. Perempuan diletakkan pada posisi kedua setelah laki – laki dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya. Melihat fenomena ini perempuan harus keluar dari zona irasionalnya sehingga ketika melangkah ke jenjang yang lebih tinggi bukan lagi pertanyaan " apakah aku mampu" tetapi harus berganti menjadi "apakah aku mau?", mempertajam pengetahuan dengan membiasakan membaca dan menganalisa. Kader KOPRI haruslah bijak dalam merespons segala bentuk stereotype, marginalisasi, dan segala bentuk kekerasan yang sering ditujukan kepada perempuan.

Berdasarkan kurikulum PB PMII terdapat tiga hal yang harus diperjuangkan oleh kader putri. ***Pertama,* Pembebasan (Al- Khuriyah),** perubahan dan pembebasan dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, dalam hal ini kader putri harus memiliki prinsip yang kuat untuk selalu berproses dalam rangka mengentaskan kebodohan yang ada dalam diri, kemudian saling bersinergi untuk memberikan dampak positif

kepada lingkungan sekitar dan masyarakat luas.

***Kedua,* Keadilan (Al-Adl)**, merepresentasikan manhaj al- fikr yang semuanya harus berlandaskan kepada keadilan yang bermula dari keadilan dalam pikiran yang meluas menjadi prinsip keadilan dalam perkataan dan perbuatan.

***Ketiga,* Kesetaraan (Al Musawwamah),** berkaitan dengan kesetaraan untuk mendapatkan hak sama baik di mata hukum, maupun dalam kehidupan social masyarakat.

Gerakan Perempuan Dari Masa Ke Masa

1. **Gerakan Perempuan Masa Pra-Kemerdekaan**

   Pada masa penjajahan, Perlakuan ketidakadilan yang dialami perempuan Indonesia, tertulis pada surat-surat R.A Kartini dari tahun 1878 sampai 1904 yang dibukukan pada permulaan abud ke-20. Surat-surat Kartini banyak berbicara tentang nila-nilai tradisi (khususnya Jawa) yang cenderung membelenggu perempuan dan tergantung pada laki-laki sehingga perempuan menjadi kaum yang tidak berdaya. Strategi perjuangan yang dilakukan oleh kartini untuk mengatasi permasalahan yang dialami kaumnya adalah dengan melalui pendekatan pendidikan, satu pendekatan yang cukup brilian dalam konteks pada masa itu. Hal ini terbukti dengan berdirinya indische Vereeniging yang selanjutnya bernama Perhimpunan Indonesia, didirikannya organisasi perempuan tahun 1012 yaitu Poetri Mardika atas bantuan Budi Utomo.

   Langkah-langkah perjuangan Kartini tersebut ternyata menjadi stimulus bagi perjuangan perempuan di masa- masa berikutnya. Sehingga memunculkan organisasi perempuan yang modern. Organisasi ini tidak hanya berjuang melawan penjajah tapi juga melawan adat istíadat yang mendiskriminasi perempuan. Program utamanya adalah memajukan perempuan dalam pendidikan dan menghilangkan perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan.

   Selain Kartini, Dewi Sartika yang kemudian meneruskan cita-cita mulia Kartini pun ikut mendirikan sekolah khusus perempuan " Kaoetamaan Istri" yang memiliki sembilan cabang di tahun 1912 yang kemudian berubah nama menjadi " SakolaRaden Dewi". Sartika juga dijuluki sebagai pahlawan pendidikan Indonesia.

Gerakan perempuan Poetri Mardika dikatakan sebagai pionir dan dikuti oleh organisasi perempuan yang lain seperti Jong Java Meisjeskring (Kelompok Pemudi Jawa Muda) tahun 1915, dan Aisyah (Pemudi Muhamadiyah) tahun 1917. Awal kegiatan ini mendorong perempuan untuk berani tampil di muka umum.

Perhatian khusus diberikan kepada lembaga perkawinan. Organisasi perempuan tumbuh bagaikan jamur. Pada masa itu organisasi yang berkembang adalah organisasi perempuan yang terkait pada agama. Seperti, Aisyah, NU, Wanita Tarbivah (Islam). Untuk wanita Protestan dikenal PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia) dan untuk wanita Katolik dikenal WKRI (Wanita Katolik Republik Indonesia).

Semangat nasionalisme para pemuda diikuti olek para perempuannya. Pada 1928 dikatakan sebagai titik balik perjuangan perempuan, tepatnya saat diselenggarakannya Kongres Perempuan Pertama di Dalem Djojodipuran. Yogyakarta. Kongres itu diprakarsai oleh tiga tokoh perempuan yang progresif, yaitu Ibu Soekonto (Wanita Utomo), Nyi Hajar Dewantara (Wanita Taman Siswa), dan Ibu Soejatim (Puteri Indonesia). Salah satu keputusan penting terbentuknya federasi Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) yang pada 1929 mengganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Dan akhirnya berubah menjadi Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) pada 1946.

2. Gerakan Perempuan Pasca Proklamasi

Peran perempuan pasca proklamasi tidak hanya berkutat pada patriarki dan pendidikan saja, namun ke ranah politik juga, sehingga perempuan rawan menjadi korban politik. Sorotan pada masa ini adalah Gerwani, organisasi wanita yang aktif di Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960 an. Organisasi ini didirikan pada tahun 1950, dan memiliki lebih dari 650.000 anggota pada tahun 1957, Kelompok ini memiliki hubungan yang kuat dengan Partai Komunis Indonesia, tetapi sebenarnya merupakan organisasi independen yang memperhatikan masalah-masalah sosialisme dan feminisme, termasuk reformasi hukum perkawinan, hik-hak buruh, dan nasionalisme Indonesia Setelah kudeta 30 September 1965, Gerwani dilarang dan banyak anggotanya tewas, dan di bawah Presiden Suharto, organisasi ini menjadi contoh yang sering dikutip dari tindakan amoralitas dan gangguan selama era pra-1965.

Pada tahun 1946, didirikanlah salah satu organisasi perempuan berbasis NU dimana Nyai Djuasih terpilih menjadi ketua pada periode 1950-1952, Meski menjadi sosok perintis Muslimat NU, Nyai Djuasih tak begitu menonjol sebagai organisator dalam kepengurusan Muslimat. Dia lebih populer sebagai mubalighat dalam kepengurusan Muslimat NU Jawa Barat. "Di dalam Islam bukan saja kaum laki-laki yang hanus dididik mengenai pengetahuan agama dan pengetahuan lain. Kaum wanita pun wajib mendapatkan didikan yang selaras dengan kehendak dan tuntutan agama Karena itu, kami wanita yang tergabung dalam NU mesti bangkit," pidatonya di atas mimbar membuat para hadirin terpesona, Dia akhinya dikenal sebagai sosok perempuan NU yanggpertama kali naik mimbar dalam forum resmi organisasi. Isi pidatonya terkait tanggung jawab yang sama dalam organisasi menjadi rintisan pandangan dan cikal bakal lahirmya Muslimat NU.

3. Gerakan Perempuan Rezim Orde Baru

Orde baru mengintruksikan sebuah ideologi gender yang bersifat ibuisme,sebuah paham yang melihat kegiatan ekonomi perempuan sebagai bagian dari perannya sebagai ibu dan partisipasi politik menjadi hal yang tak layak. Politik gender ini termanifestasi dalam dokumen-dokumen negara seperti GBHN, UU Perkawinan no.1/1974 dan Panca Dharma Wanita. Pada era ini juga terbentuk organisasi perempuan Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan PKK. Adanya organisasi ini dianggap sebagai langkah untuk membekukan gerakan perempuan, sehingga terkesan perempuan – dikandangkan". Bentuk-bentuk pemikiran perempuun dibatasi sehingga dibentuk organisasi perempuan yang mengurusi kegiatan domestik saja.

Pada 1974, di Jawa Tengah terbentuk gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan ini kemudian ditetapkan bahwa gerakan PKK berlaku secara nasional yang merupakan salah satu gerakan untuk meningkatkan kehidupan perempuan terutama di golongan bawah. Gerakan ini merupakan usaha nasional yang mendapat subsidi dari pemerintah. Fokus gerakan ini diarahkan pada upaya pembinaan kesehatan, gizi. hygiene dan menambah pengetahuan tentang pendidikan anak serta menambah keterampilan untuk menambah penghasilan.

Pada masa orde baru ternyata ada semacam jejak trauma atas

penghianatan PKI yang berimbas pada jalannya organisasi perempuan. Peristiwa pemberontakan PKI membawa perubahan besar dan mendasar bagi perkembangan kehidupan masyarakat, termasuk pada gerakan perempuan karena dampaknya adalah tumbuhnya sikap syak wasangka, Selain itu, pada masa Orba tak sedikit permasalahan perempuan yang mengemuka seperti kekerasan terhadap perempuan, kasus Marsinah, kurangnya perlindungan TKW, serta maraknya kasus pengeksploitasi tubuh perempuan untuk tujuanekonomi politik.

4. Gerakan Perempuan Era Reformasi

Organisasi perempuan masa kini sudah lebih berkonsentrasi pada permasalahan yang bersifat sosial kemasyarakatan, pendidikan, serta aspek lain yang dirasa perlu dalam usaha pemberdayaan perempuan. Organisasi-organisasi tersebut antara lain,

a. Pundi Perempuan.

Didirikan di jakarta pada tahun 2002 dengan tujuan untuk menggalang dana dan mengelolanya bagi organisasi anggota yang tersebar di selunuh Indonesia. Organisasi ini berkonsentraai pada permasalahan kekerasan dalam rumah tangga

b. Rifka Annisa.

Merupakan organisasi penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan, serta pengembangan sumber daya untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, penguatan yang dilakukan rifka annisa tidak hanya berkutat pada aspek psikologis, pendidikan, hukum, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, karena berdasar hasil survei, kebergantungan ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang menyuburkan kekerasan terhadap wanita.

c. Aliansi Perempuan Merangin

Didirikan pada 1 Januari 2003 di Jambi. Organisasi ini memiliki visi memperjuangkan terwujudnya hak otonomi/hak asasi perempuan serta mendesak pemerintah untuk membuka akses seluas-luasnya pada perempuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam usahanya, mereka mengelola klinik kesehatan, serta mendorong anggotanya untuk menerapkan usaha produktif meski dalam skala kecil.

d. Sapa Intitute (Sahabat Perempuan Institute)

Berdiri pada 25 Juni 2002 di Bandung. Pada awalnya, SI merupakan kelompok diskusi tentang hubungan antara gender, Islam, dan feminisme, serta upaya peningkatan keterlibatan perempuan di bidang pendidikan, sosial, ekonami, dan politik. Pendirian organisasi ini dilatarbelakangi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan yang mengakibatkan diskriminasi. SI menggunakan tiga pendekatan, yaitu melakukan kajian dan analisis berbagai persoalan perempuan, pengorganisasian dan pendampingan komunitas, dan advokasi untuk kebijakan publik yang adil gender.

e. Jurnal Perempuan, Jakarta.

Merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak perempuan melalui media komunikasi dan informasi. Sesuai dengan tujuannya, jurnal perempuan memiliki lima program utama, yaitu Program Jurnal Perempuan, Program Radio Jurnal Perempuan, Program Penerbitan Buku dan Kajian Perempuan, Program Video Jurnal Perempuan, dan Program Jurnal Perempuan Online yang memiliki segmentasi masing-masing sehingga tujuan organisasi tercapai.

f. Koperasi Annisa.

Didirikan oleh Kasmiati di Mataram pada 4 Maret 1989. Organisasi ini pada awalnya merupakan perwujudan keprihatinannya terhadap wanita pengusaha ekonomi lemah yang terjerat rentenir. Namun pada perkembangannya, koperasi ini juga bergerak di bidang usaha kecil sektor informal, gender dan wanita dalam pembangunan, kesehatan, anak, kependudukan, serta keluarga berencana

PKD KOMSUHA 2021

MATERI IX
STRATEGI PENGEMBANGAN PMII

A. FILOSOFI STRATEGI PENGEMBANGAN PMII

Strategi menurut Siagian adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi untuk mencapai tujuam dari organisasi tersebut. Pembinaan danpengembangan sendiri adalah upaya pendidikan yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, terpadu, teratur dan bertanggung jawab rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan suatu kepribadian yang seimbang dan utuh, baik secara jasmaniah maupun rohaniah.

Strategi pembinaan dan pengembangan PMII adalah pola dasar dan umum program jangka panjang maupun pendek dalam mewujudkan tujuan organisasi agarlangkah PMII menjadi terarah, terpadu dan berkelanjutan. Rangkaian strategi dan program yang terus menerus tersebut bertujuan untuk mewujudkan tujuan PMII yang termaktub dalam Anggaran Dasar Bab IV Pasal 4 yaitu :"Terbentuknya pribadi muslim Indonesia berilmu yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita- cita kemerdekaan Indonesia". Dari pemahaman diatas maka untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan yang telah ditetapkan diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim yang bersuasana sehat, dinamis, dan kompetitif yang selalu dilandasi dengan bingkai taqwa, intelektualitas dan profesionalitas sehingga meningkatkan kualitas pemikiran dan prestasi, serta terbangunnya suasana kekeluargaan dalam menjalankan tugas suci organisasi, kemasyarakatan dankebangsaan.
2. Kepemimpinan dipahami sebagai amanat Allah yang menempatkan setiap insan PMII sebagai Da'I untuk melakukan amar makruf nahi munkar. Yang mana kepemimpinannya selalu tercermin sikap bertanggungjawab melayani, berani, jujur, adil dan ikhlas, serta dalam kepemimpinnannya selalu penuh dengan kedalaman rasacinta, arif, bijaksana, terbuka dan demokratis.
3. Membuat suatu gerakan dan mekanisme organisasi yang tertumpu pada kekuatan dzikir dan fikir dalam setiap tata piker, sikap, dan perilaku baik

secara individu mapun oraganisatoris.

4. Struktur dan apparat organisasi yang tertata baik sehingga terwujudnya system dan mekanisme organisasi yang efektif dan efesien, dan mampu mewadahi dinamika internal organisasi serta merespon dinamika dan perubahan eksternal.
5. Produk dan peraturan-peraturan organisasi yang konsisten sehingga tegas menjadi panduan konstitutif, sehingga tercipta mekanisme organisasi yang teratur dan mempunyai kepastian hukum.
6. Mengembangkan pola komunikasi individual dan kelembagaan, sehingga tercipta komunikasi timbal balik dan berdaulat.
7. Mengembangkan pola kaderisasi yang selaras dengan tuntutan perkembangan zamankini dan mendatang demi terwujudnya pola pengembangan kader yang berkualitas, mampu menjalankan fungsi kekhilafaan yang terjawantahkan dalam perilaku keseharian, baik selaku kader bangsa mapun agama.

B. PEMAHAMAN CITRA DIRI ORGANISASI

Citra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:667) adalah pemahaman kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Citra sendiri itu abstrak tetapi wujudnya dapat dirasakan dari penilaian, baik seperti tanda respek dan rasa hormt public sekelilingnya atau masyarakat luas terhadap organisasi tersebut dilihat sebagai badan usaha yang dipercaya, professional, dan dapat diandalkan dalam pembentukan layanan yang baik.

Citra PMII yang meliputi, citra kemahasiswaan, keislaman, dan keindonesiaan. Citra Kemahasiswaan melahirkan wawasan keilmuan yang memunculkansifat keterbukaan, gandrung kepada kemajuan, berorientasi ke masa depan, dynamism tegasm jujur dan konsekuen (Gelora Megamendung 1965). Citra keislaman melahirkan wawasan keagamaan yang memunculkan sifat toleransi, keikhlasan, ukhuwah, dan tanpa pamrih. Dan citra keindonesiaan yakni melahirkan wawasan kebangsan dan melahirkan sifat patriotism, nasionalisma, kesediaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan tanah air.

Dalam memahami citra diri organisasi PMII kita juga harus memahamibeberaoa aspek penting di dalamnya yang meliputi :

a. NDP (Nilai Dasar Pergerakan)

Nilai Dasar Pergerakan (NDP) adalah rumusan gerak Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Nilai ini dirumuskan untuk mempertegas jati diri PMII sebagai organisasi ekstra universiter yang berlandaskan Islam Aswaja, independen, dan berwawasan keindonesiaan.Secara umum, NDP merupakan nilai. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik, dianggap benar dan dipatuhi oleh masyarakat.Secara tekstual, definisi NDP merupakan sublimasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan dalam kerangka pemahaman Ahlussunah sebagai landasan memberi aturan, memberi arah, mendorong, serta menggerakkan kegiatan PMII.

NDP adalah satu kesatuan nilai yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Ada 4 rumusan yang saling berhubungan yaitu : 1) Tauhid, 2) hablun minallah 3) hablun minannas, dan 4) hablun minal alam.Jikasetiap kader PMII mampu menginternalisasi nilai-nilai ini, bukan tidak mungkin PMII bisa menjadi salah satu manusia Ulul Albab yang terintegrasi antara hati, pikiran, danperbuatannya. Sinergi antara iman, ilmu dan amalnya.

b. Visi Misi

Visi misi disini tentunya secara otomatis akan merujuk pada AD/ART hasil kongres PMII, akan tetapi pada intinya yang penting adalah proses tranformasi dari nilai-nilai yang termaktub dalam visi misi tersebut yang kemudian di kerangkakan dalam sebuah program-program kerja di tingkatan kepengurusan PMII di level-level tertentu. Dan tidak kalah pentingnya adalah rumusan-rumusan produk dan peraturan organisasi yang konsisten dan tegas sebagai panduan konstitutif sehingga tercipta mekanisme organisasi yang teratur.

c. Tujuan dan AD/ART

Tujuan PMII adalah terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.Sedangkan ,Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai Hukum Dasar Organisasi. Anggaran Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara

dalam praktek penyelenggaraan organisasi.

C. PENGEMBANGAN KAPASITAS KADER

Pengembangan harus didasari pada filosofi liberasi sebagai sentral yang mengarah pada pencerahan. Pola tata piker dogmatis menjadi transformatis. Tata pikir dogmatis cenderung mengarah pada pola sikap yang statis sedangkan tata piker transformative mengarah kepada pola sikap uang dinamis. Didalam strategi pengembangan kadet kita harus mengetahui iklim yang menciptakan suasana yang sehat, dinamis, dan kompetitif yang selalu dilandasi bingkai taqwa, intelektualitas, dan profesionalitas seehingga mampu meningkatkan kualiatas pemikiran dan prestasi. Ada empat aspek penting untuk mengedepankan pengembangan perjuangan lebih bermakna dan terarah :

1. Ideologi gerakan sebagai penguat

   Untuk membaca realitas sosial PMII mendasarkan pada ideology dan wacana kritis. Penguatan ideology harus ditekankan untuk mempunyai kektauan yang terarah dan konsisten. Ideology tidak hanya berfungsihanya membantu dan mengarahkan, akan tetapi juga sebagai perintang.

2. Desentralisasi gerakan

   Desentralisasi sebagai komponen yang sangat penting dalam gerakan sosial pemberdayaan masyarakat mempunyai arti strategis karena akan membuka peluang yang lebar kepada masyarakat dalam perumusan kebijakan pemerintah atau organisasi.

3. Kompetisi dan konflik sebagai penyemangat

   Kompetisi sebagai pendorong organisasi yang dinamis, memaksa organisasimeningkatkan laju perubahan orogram dan tingkat keterampilannya. Kompetensi juga merupakan factor yang menimbulkan kekretifitasan dan inovasi. Dan konflik berpengaruh efektif terhadap seluruh tingkat relitas sosial. Konflik berperan penting dalam mensukseskan gerakan osial. Berlawanan dengan apa yang mungkin dipikirkan orang, konflik internal dalam gerakan sosial akan berdampak positifuntuk mencapai tujuan gerakan bersama. Konflik internal akan fungsional bila tujuannya adalah mempercepat gerakan dan perubahan sosial.

4. Pemanfaatan teknologi informasi

Peran teknologi sangat besar artinya teknologi menciptakan beberapa alternative gerakan. Teknologi diharapkan mencapai cita-cita yang sebelumnya tidak dapatdicapai kemungkinan dan dapat mengubah kesuliyasn relative atau memudahkan menyadari nial-nilai berbeda. Dengan adanya inovasi teknologi masyarakat mempunyai banyak alternating, dan jika ia memilih alternative baru, maka ia memulai perubahan besar diberbafai bidang.

PKD KOMSUHA 2021

DAFTAR PUSTAKA

Santoso Kristeva Nur Sayyid, 2015, *Manivesto Wacana Kiri: Membentuk Solidaritas Organik,* Edisi Revisi, Cet. XXXII, Yogyakarta; Pustaka Pelajar

Modul PKD PMII Kawah Chondrodimuko

Buku Muspimnas PMII, Boyolali, 2019

http;// cv-fajarwagadey.blogspot.com

PKD KOMSUHA 2021

CATATAN PENTING

PKD KOMSUHA 2021

CATATAN PENTING

PKD KOMSUHA 2021

نهضة العلماء
N U